

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM
MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI
DESA AWO'GADING**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (SE) pada Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Palopo*



Oleh

FAUZIA AFDILLA

2204030066

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN BISNIS SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO**

2025

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM
MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI
DESA AWO’GADING**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (SE) pada Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Palopo*



Oleh

FAUZIA AFDILLA

2204030066

Pembimbing:

Hendra Safri, S.E., M.M.

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN BISNIS SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO**

2025

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fauzia Afdilla
NIM : 2204030066
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi/tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi/tesis ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 30 Oktober 2025

Yang membuat pernyataan,



Fauzia Afdilla

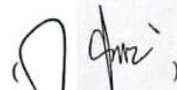




2204030066

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur di Desa Awo'Gading yang ditulis oleh Fauzia Afdilla Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2204030066, mahasiswa Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, tanggal 29 Januari 2026 bertepatan dengan 10 Sya'ban 1447 Hijiriah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Palopo, 5 Februari 2026

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I. | Ketua Sidang | () |
| 2. Ilham, S.Ag., M.A. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A. | Penguji I | () |
| 4. Agussalim Sunusi, S.E., M.M. | Penguji II | () |
| 5. Hendra Safri, S.E., M.M. | Pembimbing | () |

Mengetahui:



Rektor UIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.
NIP. 198201242009012006



Ketua Program Studi
Manajemen Bisnis Syariah

Umar, S.E., M.SE.
NIP. 199404072020121017

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur di Desa Awo’Gading” setelah melalui proses yang panjang. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana ekonomi dalam bidang manajemen bisnis syariah pada Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo.

Ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua, ayahanda tercinta Ibrahim G, dan ibunda tercinta Parsini yang telah mendidik saya dengan penuh kasih sayang. Semoga dengan gelar sarjana ini menjadi awalan bagi saya untuk dapat membanggakan ayah dan ibu di dunia dan diakhirat kelak. Penulisan skripsi ini terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag. selaku Rektor UIN Palopo, beserta Wakil Rektor I, II, dan III IAIN Palopo.
2. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Palopo beserta Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Palopo.
3. Umar, S.E., M.SE. selaku Ketua Program Studi Manajemen Bisnis Syariah di UIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Hendra Safri, S.E., M.M. selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.

5. Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A. dan Agussalim Sunusi, S.E., M.M. selaku penguji I dan penguji II yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Mursyid, S.Pd., M.M. selaku Dosen Penasehat Akademik.
7. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai UIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di UIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepala Desa Awo'Gading Kecamatan Lamasi beserta aparat desa dan masyarakat, yang telah memberikan izin dan bantuan dalam melakukan penelitian.
9. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Manajemen Bisnis Syariah UIN Palopo angkatan 2022 terkhususnya kelas C, rekan KKN Posko 97 dan rekan magang MBKM 2024 yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini. Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt. Amin.

Palopo, 29 Januari 2026



Fauzia Afdilla

2204030066

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Tabel 0.1 Transliterasi Latin Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	s\`a	s\`	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	h}a	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	z\`al	z\`	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	s}ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t}a	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawalkataa mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, translitenya sebagai berikut:

Tabel 0.2 Transliterasi Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Tabel 0.3 Transliterasi Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, translitenya berupa gabungan huruf:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>Fathah dan ya'</i>	Ai	a dan i
اُو	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفًا: *kaifa*

هَؤُلَاءِ: *hauila*

B. Maddah

Maddah atau vokal Panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tabel 0.4 Maddah

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
-------------------	------	-----------------	------

ك ... ك ا ...	<i>Fathah</i> dan alif atau ya'	ā	a garis di atas
ا	<i>Kasrah</i> dan ya'	ī	i garis di atas
وا	<i>Dammah</i> dan wau	ū	u garis di atas

Contoh:

مَاتَام : *māta*

رَامِي : *ramā*

قِيلَان : *qīla*

يَامُوتِي : *yamūtu*

C. Ta'Marbutah

Transliterasi untuk ta'marbutah ada dua, yaitu: ta'marbutah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adlah [t]. sedangkan ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat *sukun*, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta'marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta'marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha[h]*.

Contoh:

رَاوْدَهَاءُ اَلْاَثْفَالِ : *raudhah al-athfal*

اَلْمَدِيْنَةُ اَلْفَدْحِيْلِيَّةُ : *al-madinah al-fadhilah*

اَلْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *asydid* () dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا *rabbana*

أَنْجِنَا : *najjaina*

أَلْحَقْنَا : *al-haqq*

أُمِّمْنَا : *nu'ima*
أُدْوِعْنَا : *'aduwwun*

Jika huruf *ber-tasydid* diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (—), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi i.

Contoh:

أَلِيْنَا : 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

أَرَبِيْنَا : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

أَلْسُمْسَا : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
أَلزَّلَا : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

أَلفَلْسَافَا : *al-falsafah*

أَلبِلَادَا : *al-biladu*

F. Hamzaha

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

نورحُمَا : *ta'muruna*

عَوْنِهَا : *al-nau'*

سَيِّئَاتُ : *syai'un*

مُتْرَمٌ : *umirtu*

G. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fi Zilal al-Qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

H. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِإِذْنِ اللَّهِ *inullah* بِإِذْنِ اللَّهِ *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

حُرِّيْنَا مَهْمَا لَمْ يَكُنْ فِي رَحْمَتِ اللَّهِ *hum fi rahmatillah*

I. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa maa Muhammadun illaa rasul

Inna awwala baitin wudi 'a linnaasi lallazii bi Bakkata mubaarakan

Syahru Ramadhaan al-lazii unzila fiih al-Qur'aan

Nashiir al-Diin al-

Thuusii Abuuu Nashr

al-Faraabii

Al-Gazaali

Al-Munqiz min al-

Dhalaal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulismenjadi: Ibnu Rusyd,
 Abu al- Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Wali
 d Muhammad Ibnu)
 Nasr Hamid Abu Zaid, ditulismenjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid
 (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

J. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>shubhanahu wa ta'ala</i>
saw.	=	<i>shallallahu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-salam</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
Wr.	=	Warahmatullahi
Wb.	=	Wabarakaatuh
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...:4	=	QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali 'Imran/3:4
HR	=	Hadits Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PRAKATA.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN.....	vii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR BAGAN.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
ABSTRAK.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A...Latar Belakang.....	1
B...Rumusan Masaalah.....	8
C...Tujuan Penelitian.....	8
D...Manfaat Penelitian.....	8
E...Sistematika Penulisan.....	9
BAB II KAJIAN TEORI.....	10
A...Deskripsi Teori.....	10
1....Efektivitas.....	10
2....Desa.....	15
3....Dana Desa.....	17
4....Pembangunan Infrastruktur.....	24
B...Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	32
C...Kerangka Pikir.....	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
A...Jenis Penelitian.....	39
B...Lokasi dan Waktu Penelitian.....	39
C...Subjek dan Objek Penelitian.....	39

D...Teknik Pengumpulan Data.....	40
E... Pengujian Keabsahan Data.....	41
F... Teknik Analisis Data.....	43
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA.....	45
G...Deskripsi Data.....	45
1....Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	45
2....Visi dan Misi Desa Awo’Gading.....	48
3....Struktur Organisasi Desa Awo’Gading.....	50
4....Deskripsi Informan.....	50
H...Pembahasan.....	52
1....Hasil Pembahasan.....	52
2....Pembahasan Hasil Penelitian.....	61
BAB V PENUTUP.....	66
I.... Simpulan.....	66
J.... Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	75

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 Q.S. Hud/61 ayat 2.....	2
Kutipan Ayat 2 Q.S. An-Nisa/4 ayat 58.....	4
Kutipan Ayat 3 Q.S. Asy-Syuara/42 ayat 38.....	14
Kutipan Ayat 4 Q.S Al-Baqarah/2 ayat 282.....	22
Kutipan Ayat 5 Q.S. Al-Baqarah/2 ayat 188.....	23

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Total Penerimaan Dana Desa(DD) Tahun 2020-2024.....	3
Tabel 1.2 Pembangunan Infrastruktur	4
Tabel 2.1 Total Penerimaan Anggaran Dana Desa(ADD)	15
Tabel 2.1 Total Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah(BHRD)..	15
Tabel 2.1 Penelitian terdahulu yang relevan	35
Tabel 3.1 Daftar Informan Penelitian.....	40
Tabel 4.1 Luas Wilayah Desa Awo’Gading.....	46
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Desa Awo’Gading.....	46
Tabel 4.3 Daftar Tingkat Pendidikan Masyarakat.....	47
Tabel 4.4. Jumlah Penduduk berdasarkan Pekerjaan.....	47
Tabel 4.5 Daftar Nama Informan Penelitian.....	51
Tabel 4.6 Informan berdasarkan Jenis Kelamin.....	51
Tabel 4.7 Informan berdasarkan Tingkat Usia.....	51
Tabel 4.8 Informan berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	52

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Pemikiran.....	38
Bagan 4.1 Struktur Organisasi Desa Awo'Gading.....	50

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

Lampiran 2. Surat Izin Penelitian

Lampiran 3. Dokumentasi

Lampiran 4. Halaman Persetujuan Pembimbing

Lampiran 5. Nota Dinas Pembimbing

Lampiran 6. Nota Dinas Tim Verifikasi Naskah Skripsi

Lampiran 7. Turnitin

Lampiran 8. Riwayat Hidup

ABSTRAK

Fauzia Afdilla, 2026. *“Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur di Desa Awo’Gading”*. Skripsi Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Hendra Safri.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pembangunan infrastruktur bagi masyarakat dalam menunjang aktivitas sehari-hari. Pemerintah pusat telah mengalokasikan dana desa untuk meningkatkan pembangunan fisik di setiap desa termasuk Desa Awo’Gading. Namun, efektifitas pengelolaan dana desa dalam hal ini masih perlu dikaji lebih lanjut.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur dan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur di Desa Awo’Gading.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Data bersumber dari data primer dan data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan dalam menganalisis data yaitu dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur di Desa Awo’Gading belum efektif sepenuhnya, hal ini dikarenakan seluruh tahapan pembangunan yang menjadi tolak ukur efektivitas belum sesuai dengan dasar hukum yang dijadikan landasan efektivitas yaitu UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pada tahapan perencanaan, pembangunan dikategorikan cukup efektif karena meskipun telah melibatkan masyarakat dalam musyawarah yang membahas perencanaan program pembangunan namun partisipasi masyarakat dalam menghadiri musyawarah desa masih terbilang kurang. Pada tahapan pelaksanaan sudah termasuk efektif karena pelaksanaannya telah tepat sasaran dan terlaksana tepat waktu serta terlaksana dengan memberdayakan potensi lokal. Tahapan pengawasan sudah efektif karena kedua indikator dari tahapan ini yaitu akuntabilitas penyelenggara dan evaluasi kegiatan sudah terpenuhi. Faktor penghambat efektivitas pengelolaan dana desa adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengusulkan pendapat mengenai program yang akan dilaksanakan.

Kata Kunci: Efektivitas, Dana Desa, Pembangunan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan merupakan salah satu satu prioritas pemerintah saat ini. Pelaksanaan pembangunan nasional diharapkan dapat menyeimbangkan pembangunan daerah dan desa yang nantinya memungkinkan adanya kemajuan negara. Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah mendelegasikan wewenang terhadap pemerintah desa untuk menjalankan pemerintahannya sendiri. Salah satu faktor utama yang menunjang kesejahteraan masyarakat adalah pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa tersebut.

Siagian dalam bukunya menuturkan bahwa pembangunan desa merupakan rangkaian keseluruhan yang berisi tahapan usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan memperbesar kesejahteraan masyarakat dalam desa secara menyeluruh.¹ Semua pembangunan desa yang direalisasikan harus berdasarkan kebutuhan masyarakat, potensi yang desa dan masalah yang dihadapi. Sebagai bentuk kepedulian, pemerintah telah memberikan anggaran pembangunan yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pengembangan wilayah pedesaan yang dikenal dengan istilah Dana Desa (DD).

Pembangunan infrastruktur yang tepat dapat meningkatkan produktifitas masyarakat. Namun ada banyak faktor yang memengaruhi prosesnya dan yang paling krusial adalah masalah pembiayaan. Disamping itu pemerintah daerah telah memberikan anggaran untuk menjalankan berbagai kegiatan dalam pemerintahan desa. melalui anggaran tersebut, pemerintah desa berkewajiban untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk menjalankan pemerintahan demi kesejahteraan seluruh masyarakatnya.

¹ Sondang Siagian, *Administrasi Pembangunan* (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1985).

Pembangunan Infrastruktur adalah salah satu keperluan yang penting bagi masyarakat agar dapat menunjang aktivitas sehari-hari. Prioritas utama dalam distribusi sumber daya dari dana masyarakat seharusnya adalah peningkatan dan pemberdayaan masyarakat. Dana masyarakat yang dikelola secara efektif memiliki potensi besar untuk pembangunan dan kemajuan desa. Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan kemakmuran. Dalam Islam, manusia dikatakan sebagai *musta'mir* atau pengelola/pembangun. Sebagaimana yang terdapat dalam Q.S Hud(11) ayat 61 yang berbunyi:

هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ ثُمَّ تُوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ

Terjemahnya:

Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)".

Kata *is'ta'marakum* dalam ayat ini menerangkan bahwa Allah swt. Memerintahkan manusia agar membangun dan memakmurkan bumi. Pembangunan infrastruktur merupakan perwujudan dari upaya “memakmurkan bumi” yang diperintahkan oleh Allah swt.

Perencanaan anggaran untuk suatu lembaga memerlukan persiapan yang matang. Anggaran harus memenuhi persyaratan untuk mencapai tujuan dan misi organisasi. Setiap anggaran harus memiliki tolak ukur atas kinerja yang akan dicapai karena standar inilah yang akan menjadi tolak ukur dalam pencapaian kinerja organisasi.¹

Semua desa berhak memperoleh bantuan dari pemerintah yang berupa dana yang diberikan pertahunnya begitu pula dengan Desa Awo'Gading, salah satu desa yang terletak di Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan yang juga mendapatkan dana dari pemerintah daerah dimana dana desa tersebut merupakan salah satu dari beberapa sumber pendapatan asli desa. Bantuan dari pemerintah menjadi sumber utama pendapatan daerah,

¹ Abd Kadir Arno, “Penyusunan Anggaran Perspektif Fiqhi Anggaran Hukum Ekonomi Syariah,” *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 1, no. 1 (2019): 32, <https://doi.org/10.24256/alw.v1i1.625>.

sehingga anggaran daerah sangat tergantung pada pemerintah. Secara umum, terdapat tiga sumber pendapatan desa yaitu Dana Desa(DD), Alokasi Dana Desa(ADD), serta Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah(BPH). Namun, dalam penelitian ini yang menjadi fokus masalah adalah Dana Desa. Berikut ini adalah data dana desa di Desa Awo’Gading pada tahun 2019-2024.

Tabel 1.1 Total Penerimaan Dana Desa(DD) tahun 2020-2024

No.	Tahun	Nominal (Rp)
1.	2020	803.737.000,00
2.	2021	827.727.000,00
3.	2022	719.126.000,00
4.	2023	733.092.000,00
5.	2024	993.253.000,00

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa

Data diatas merupakan besaran dana desa yang didapatkan oleh pemerintah Desa Awo’Gading dalam lima tahun terakhir, dapat dilihat bahwa dana yang diturunkan nominalnya bersifat fluktuatif, tetapi masyarakat pastinya berharap pemerintah dapat mempergunakannya dengan cermat agar pembangunan desa dapat terlaksana secara maksimal sebagaimana mestinya. Untuk mendukung aktivitas sehari-hari warga, pembangunan infrastruktur sangatlah penting. Sebagaimana dalam Q.S An-Nisa(4) ayat 58 yang berbunyi:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Ayat tersebut menerangkan bahwa pengelolaan dana haruslah dilakukan dengan amanah agar berdampak positif. Maka dari itu masyarakat

berharap dana desa diprioritaskan untuk penyelenggaraan pembangunan. Namun, berdasarkan wawancara singkat yang dilakukan oleh peneliti terhadap sekretaris Desa Awo'Gading, ternyata pembangunan fisik bukanlah prioritas. Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk ketahanan pangan sebesar 20%, program Bantuan Langsung Tunai(BLT) 15%, pemberdayaan , operasional pemerintahan desa 3%, Badan Usaha Milik Desa(BUMDes) dan yang terakhir pembangunan infrastruktur. Hal tersebut berbanding terbalik dengan harapan masyarakat. Dana yang disalurkan pun terbilang tidak sedikit, tapi ini bukan berarti pengeloannya telah berjalan dengan efektif dan memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat. Dana desa dalam pengelolaannya memerlukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pada penggunaannya. Setiap proyek harus sesuai dengan rencana awal, dan masyarakat dan pemerintah harus memiliki hak untuk mengetahui dan memantau perkembangan pembangunan selama prosesnya. Dengan dana desa, berikut adalah proyek infrastruktur yang telah diselesaikan di Desa Awo'Gading selama lima tahun terakhir.

Tabel 1.2 Pembangunan Infrastruktur

No	Tahun	Jenis Kegiatan	Vol.(Meter/Unit)	Pengeluaran(Rp)
1.	2020	Pembangunan Irigasi	250	178,316,100
		Total		178,316,100
2.	2021	Pembangunan Jamban Keluarga	38	117,839,800
		Pembangunan Irigasi	268	204,607,700
		Pembangunan Talud	239	80,962,000
		Total		403,409,500
3.	2022	Pengerasan Jalan	1405	143,825,200
		Pembangunan Talud	133	52,600,000
		Total		196,425,200
4.	2023	Pembangunan Irigasi	295	130,000,000
		Pembangunan Plat Deuker	1	15,000,000
		Pembentukan Jalan Tani	1298	109,300,000
		Total		254,300,000
5.	2024	Pengkerikilan Jalan	507	96,700,000
		Pembangunan Irigasi	315	249,217,600
		Pembangunan Talud	69	50,511,500
		Pembangunan Plat Deuker	3	82,611,000

	Total	323,976,500
--	--------------	--------------------

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh seberapa besar komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa untuk saling bergotong-royong dalam membangun desa. Adapun prestasi kerja aparat pemerintahan daerah amat dipengaruhi oleh tingkat motivasi dan keterampilan dalam melaksanakan tanggungjawab pelayanan.²

Menurut Program Pembangunan Pedesaan pemerintah, manajemen sumber daya manusia sangat penting untuk pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya pedesaan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa tugas utama manajemen SDM adalah mengelola karyawan secara efektif dan efisien untuk memastikan bahwa karyawan puas dengan pekerjaan mereka.³

Anwar dan Melawati menyatakan bahwa manajemen sumber daya pedesaan yang efektif sangat penting untuk pembangunan infrastruktur, terutama dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menekankan anggaran pembangunan desa harus digunakan sesuai peraturan sehingga hasilnya maksimal seperti harapan seluruh pihak. Oleh karena itu, pengelolaan dana desa kiranya dapat menjadi garda terdepan dalam mengembangkan infrastruktur desa yang mumpuni.⁴

Penelitian demikian sejalan pula dengan penelitian yang direncanakan penulis, namun penelitian ini akan menguak faktor-faktor yang memengaruhi pembangunan infrasturktur serta mengkaji lebih dalam efektivitas pengelolaan dana desa dengan menggunakan indikator-indikator efektivitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Meyfi dan Tuti menekankan bahwa didalam pengelolaan dana desa, aspek pencegahan korupsi tidak boleh dilewatkan. Pencegahan korupsi perlu dilakukan dalam prosesnya pengelolaan

² Mahadin Shaleh, *Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai* (Makassar: Aksara Timur, 2018).

³ Nurdin Batjo and Mahadin Shaleh, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Makassar: Aksara Timur, 2018).³

⁴ Adji Priatna Anwar and Fitri Melawati, "Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Di Desa Cinengah Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat" 1 (2024), <https://doi.org/10.30737/interaksi.v1i1.5174>.

dana desa. Pendekatan yang preventif harus diterapkan agar pemerintah desa memastikan bahwa dana yang dipergunakan dalam pembangunan infrastruktur adalah transparan dan akuntabel.⁵

Meyfi dan Tuti dalam penelitiannya berfokus pada aspek transparansi dan akuntabel, sedangkan dalam penelitian ini akan dikupas secara mendalam seluruh asas-asas pengelolaan dana desa, yaitu bukan hanya transparan dan akuntabel, tetapi jugapartisipatif dan tertib disiplin anggaran.

Nasruddin dan Firmansyah mengemukakan bahwa berhasil atau tidaknya pengelolaan dan desa amat dipengaruhi oleh pengawasan yang ketat, yang mana dalam hal ini sangat krusial untuk melihat apakah dana yang dianggarkan telah digunakan sebagaimana mestinya.⁶

Penelitian ini bukan hanya tentang bagaimana menekankan pada pengawasan, tetapi juga bagaimana proses perencanaan yang partisipatif dan transparan serta pelaksanaan dana desa terkait pembangunan infrastruktur yang harus tepat sasaran dan tepat waktu, terdapat peran dari masyarakat dan memanfaatkan potensi dana desa dalam keberlangsungan program. Keterlibatan masyarakat juga merupakan elemen kunci dalam pengelolaan dana. Proyek harus disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Sebagaimana ditunjukkan oleh studi Solehan dan Sukresno, staf yang kompeten dan keterlibatan masyarakat penting dalam pengelolaan dana. Hasil penelitiannya menunjukkan masih ada kendala dalam proses pengelolaan seperti minimnya pelatihan bagi aparat desa dan kurangnya kordinasi dengan masyarakat.⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Solehan dan Sukresno tersebut menelaah partisipasi masyarakat sebagai aspek paling krusial dalam pengelolaan dana, disamping itu kemampuan tenaga kerja sangatlah mempengaruhi jalannya

⁵ Meyfy Mercy Karuh and Tuti Widyaningrum, "Penyelewengan Dana Desa: Tinjauan Terhadap Korupsi Dan Upaya Penanggulangannya Di Desa Songbledeg, Kabupaten Wonogiri," *Iblam Law Review* 4 (2024).

⁶ Taufik Nasruddin and Amrie Firmansyah, "Menutup Celah Korupsi: Evaluasi Pengawasan APIP Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Indonesia" 3 (2024).

⁷ Solehan and Sukresno, "Implementasi Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan Pemerintahan Desa Yang Baik (Studi Kasus i Desa Ngabul Kabupaten Jepara)," *Ekonomi, Koperasi Dan Kewirausahaan* 15 (2024).

program. Penelitian ini bukan hanya membahas partisipasi dan keterampilan SDM, tetapi juga memadukan akuntabilitas dan transparansi sebagai alat ukurnya. Desa Awo'Gading sebagai salah satu desa yang menerima dana desa memiliki banyak potensi untuk berkembang.

Penelitian-penelitian terkait pengelolaan dana diatas seperti yang dikemukakan Anwar dan Melawati yang menekankan manajemen sumber daya pedesaan efektif dan penggunaan anggaran sesuai peraturan, Meyfi dan Tuti yang berfokus pada pencegahan korupsi, Nasruddin dan Firmansyah yang menyoroti pentingnya pengawasan ketat, serta Solehan dan Sukresno yang menekankan kompetensi staff umumnya membahas aspek-aspek spesifik secara terpisah tanpa integrasi komprehensif sedangkan penelitian ini akan menganalisis secara mendalam terhadap semua asas pengelolaan desa yakni transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan tertib disiplin anggaran sebagai faktor-faktor yang saling terkait penelitian. Belum adanya kajian holistik menggunakan indikator efektivitas yang mencakup perencanaan partisipatif, pelaksanaan tepat sasaran dan pengawasan secara keseluruhan. Penelitian ini berbeda karena secara eksplisit mengintegrasikan dan menganalisis semua aspek tersebut sebagai variable utama untuk menguak bagaimana efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Awo'Gading yang belum diteliti secara komprehensif dalam studi sebelumnya.

Berdasarkan fakta-fakta diatas, dapat dipahami bahwa melimpahnya dana desa masih belum bisa menjamin kesejahteraan masyarakat, ini bukan berarti pengelolaan dana desa yang dilakukan belum efektif. Dana desa yang diharapkan menjadi penunjang kesejahteraan masyarakat belum sepenuhnya terpenuhi. keefektifan pengelolaan dana desa masih menjadi tanda tanya bagi sebagian besar masyarakat dan seharusnya dapat ditangani oleh pemerintah desa. Apabila ditemukan fakta bahwa proses pengelolaan dana desa belum efektif, maka masyarakatlah yang akan dirugikan.

Pembahasan diatas telah memperjelas bahwa terdapat kesenjangan antara idealitas masyarakat dengan kenyataan dilapangan, dimana masyarakat berharap dana desa diprioritaskan untuk pembangunan nyatanya

pembangunan infrastruktur hanya dilakukan jika terdapat sisa anggaran yang diprioritaskan untuk hal lain seperti ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Banyaknya penelitian serupa yang dilakukan oleh para peneliti sebelumnya menjadi pertanda bahwa efektifitas pengelolaan dana masih perlu dikaji lebih lanjut. Dengan mempertimbangkan fakta-fakta ini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul *“Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur di Desa Awo’Gading.”*

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah berisi pertanyaan yang jawabannya akan ditemukan dengan melakukan pengumpulan data dilapangan serta menjadi landasan bagi peneliti untuk menentukan perencanaan yang tepat dalam melakukan penelitiannya. Rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah efektivitas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur di Desa Awo’Gading?
2. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Awo’Gading?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur di Desa Awo’Gading.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur di Desa Awo’Gading.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dari perspektif akademis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk berkontribusi pada pengembangan konsep efektivitas pengelolaan dana masyarakat, khususnya dalam program pembangunan infrastruktur bagi pemerintah kota itu sendiri. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan ilmu

administrasi dan menjadi referensi, parameter, serta bahan pemikiran bagi peneliti di masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman publik tentang proses pengelolaan dana masyarakat dan mendorong partisipasi yang lebih aktif dari awal hingga akhir. Pemerintah Desa Awo'Gading dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai dasar alokasi sumber daya. Juga diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah ketika akan membuat kebijakan terkait pengelolaan dana desa agar segala tujuan dapat terealisasi secara efektif dan efisien.

E. Sistematika Penulisan

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini dimulai dengan latar belakang yang menjadi dasar peneliti mengangkat tema penelitian ini. Dalam bagian ini juga dijabarkan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan proposal.

2. BAB II KAJIAN TEORI

Teori-teori yang berkaitan dengan tema penelitian digambarkan secara teoritis pada bagian ini dan berfungsi sebagai landasan dalam membantu penyusunan penelitian yang membentuk beberapa sub bahasan. Penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran juga termuat dalam bagian ini.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Bagian ini mencakup metode penelitian yang akan digunakan peneliti dalam penyusunan proposal. Bab ini juga menjelaskan siapa yang menjadi subjek atau informan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, serta teknik yang akan digunakan dalam pengumpulan data hingga tahapan menganalisis data.

4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjabarkan penemuan penelitian serta mengemukakan objek penelitian dan pembahasan hasil temuan yang telah dilaksanakan.

5. BAB V PENUTUP

Bagian akhir yang memaparkan simpulan mengenai pembahasan dari bagian-bagian sebelumnya serta rangkaian saran dari topik yang diteliti.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Efektivitas

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan efektivitas sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan. Istilah "efektif" berarti mencapai hasil, berdampak, berpengaruh, berdampak, atau efisien.¹ Agung Kurniawan, dalam bukunya, menjelaskan bahwa efektivitas mengacu pada kemampuan suatu organisasi untuk menjalankan tugas dan fungsi, seperti kegiatan program atau misi operasional.²

Efektivitas bisa dijelaskan sebagai tingkat kesesuaian antara apa yang berhasil dicapai dan target yang sudah direncanakan sebelumnya dengan kata lain sebagai bentuk kapasitas sebuah organisasi untuk mewujudkan target yang telah ditetapkan, dengan memanfaatkan berbagai program yang telah disusun. Dalam sangkut paut sebab-akibat, efektivitas bukan hanya tentang pelaksanaan tugas dan fungsi, tetapi juga berkaitan dengan seberapa tepat hasil yang dicapai berdasarkan target yang dipatok. Keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya bergantung pada keefektifitasannya. Apabila kinerja, tindakan, atau keluaran dari para karyawan tidak seragam dan target akhir gagal tercapai, maka seluruh proses tersebut dianggap kurang efektif. Efektivitas dalam penelitian ini berfokus tentang bagaimana pemerintah desa mengelola dana desa untuk pembangunan infrastruktur. Menguak bagaimana pemerintah dapat menjalankan pengelolaan dengan efektif atau tidak melalui indikator yang menjadi tolak ukur efektivitas.

Efektivitas bisa dipahami sebagai gabungan dari berbagai elemen penting, seperti ketepatan dalam hal waktu, akurasi biaya yang dikeluarkan, presisi pengukuran yang dilakukan, kecermatan dalam mengambil keputusan, kejelasan berpikir, ketelitian saat menyelesaikan pesanan, ketepatan

¹ Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI)* (Jakarta: Gramedia, 2007).132

² Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik* (Yogyakarta: Pembaharuan, 2005).109

menentukan tujuan, serta keakuratan mendefinisikan tujuan itu sendiri. Dengan memenuhi kedelapan indikator tersebut, maka kegiatan atau program suatu organisasi sudah dapat dikatakan efektif.

a. Indikator Efektivitas

Sulastri menuturkan bahwa efektivitas pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur dapat diukur dengan berlandaskan pada UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa yang diuarikan dalam beberapa poin dan juga digunakan untuk menjadi dasar atau indikator alat ukur efektivitas dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1.) Perencanaan

Perencanaan pengelolaan dana diartikan sebagai musrenbang desa untuk menentukan langkah terbaik dalam memanfaatkan dana desa yang ditentukan oleh peserta musrenbang, hasil musrenbang dan transparansi rencana kepada masyarakat. Sebagaimana yang terdapat dalam UU No 6 tahun 2014 tentang desa sebagai berikut:

- a.) Pasal 80 ayat 1 berbunyi “perencanaan Pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa”.
- b.) Pasal 80 ayat 2 berbunyi “pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah pembangunan desa.”

Dari pasal diatas menerangkan bahwa efektifnya tahapan perencanaan ditentukan pada ada tidaknya musyawarah dilakukan. Maka dari itu indikator efektivitas tahap perencanaan adalah musyawarah desa dan transparansi rencana. Musyawarah adalah kegiatan yang dilakukan oleh aparat desa dalam menentukan prioritas pembangunan desa dengan mengikutsertakan masyarakat yang dilakukan sebelum pelaksanaan pembangunan dilakukan. Transparansi rencana adalah komitmen yang wajib dijalankan oleh pihak pemerintah dalam menentukan pembangunan, dengan terbukanya akses dan informasi terhadap perencanaan yang akan dilakukan. Transparansi dicapai apabila musyawarah dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Aspek perencanaan yang berokus pada prinsip musyawarah ini juga diterangkan dalam Q.S. Asy-Syura(42) ayat 38 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Terjemahnya:

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa segala keputusan harus ditentukan melalui musyawarah. Efektivitas pembangunan infrastruktur ditentukan pada apakah pembangunan tersebut telah memenuhi kebutuhan masyarakat atau bukan. Musyawarah adalah faktor utama agar dana desa tepat sasaran.

b.) Pelaksanaan

Pelaksanaan ini mengacu pada penyelesaian program yang direncanakan oleh semua pihak yang terlibat. Indikator pelaksanaan adalah ketepatan sasaran dan ketepatan waktu dan pemanfaatan potensi lokal. Hal ini berdasarkan pada UU No 6 tahun 2014 tentang desa pasal 81 ayat 1 s/d 3 antara lain:

- 1.) Pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- 2.) Pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong.
- 3.) Pelaksanaan pembangunan desa dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa.

Pembangunan dilaksanakan sesuai rencana artinya pembangunan tersebut wajib terlaksana tepat sasaran dan sesuai tenggat. Tepat sasaran berarti program yang dilaksanakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. tepat waktu artinya pengerjaan yang dilakukan harus sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Pemanfaatan potensi lokal adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberdayakan masyarakatnya.

c.) Pertanggungjawaban/Pengawasan

Pertanggungjawaban disini merujuk pada laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh pemerintah dan pengawasan atau evaluasi dari masyarakat. Indikator efektivitas pada tahapan ini adalah akuntabilitas penyelenggara dan

evaluasi kegiatan. Hal ini berdasarkan pada UU No 6 Tahun 2014 tentang desa berikut ini:

- 1.) Pasal 82 ayat 1 berbunyi “Masyarakat desa berhak mendapat informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa.”
- 2.) Pasal 82 ayat 2 berbunyi “Masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa”.³

Akuntabilitas penyelenggara pada tahapan ini merujuk pada kewajiban penyelenggara dalam hal ini adalah aparat desa mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang dikelolanya. Evaluasi kegiatan merupakan proses untuk menilai efektivitas yang dilakukan oleh masyarakat.

Mengenai efektivitas dalam hal pengelolaan keuangan pemerintah, Devas mengatakan bahwa efektivitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah meliputi pengaturan serta penggunaan aset negara yang dilakukan secara efisien agar dapat mendukung program yang telah dirancang sehingga dapat terealisasi sesuai dengan perencanaan, tentu saja dengan menggunakan sumber daya seefisien mungkin. Efektivitas erat kaitannya dengan seberapa tepat suatu organisasi mengelola sumber daya yang dimilikinya agar selaras dengan target yang sudah ditetapkan. Dalam konteks pengelolaan keuangan, efektivitas ini mengacu pada seberapa banyak dana yang akan dialokasikan untuk mendukung program-program yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tersebut.⁴

Penjelasan diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa didalam bidang keuangan pemerintahan, konsep ini tidak hanya soal mencapai tujuan, tetapi juga bagaimana pemerintah memaksimalkan cara mengelola dan memanfaatkan sumber dayanya dalam rangka merealisasikan seluruh rancangan kegiatannya. Pencapaian tersebut dapat dilihat dari keterampilan pemerintah dalam mengefisienkan alokasi dana sesuai kebutuhan program juga menjamin seluruh kegiatan terlaksana berdasarkan perencanaan.

³ Nova Sulastri, “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Wakopute Kabupaten Muna” (Universitas Halu Oleo Kendari, 2016).⁴⁷

⁴ Munir and H Dasril, *Kebijakan Dan Manajemen Keuangan Daerah* (Yogyakarta: YPAP, 2004).⁴⁴

Pada intinya, efektivitas dapat dilihat dari apakah operasionalisasi tugas dan fungsi telah terealisasi dengan baik, kemujuran program dalam menjalankan rencana, keberfungsian regulasi dalam memonitoring program, serta tercapainya kondisi ideal atau tujuan akhir.

2. Desa

Desa, menurut KBBI, adalah suatu wilayah yang terdiri dari beberapa keluarga dan memiliki pemerintahan sendiri yang dikepalai oleh seorang kepala desa.. Pemerintahan terkecil dinegara adalah desa. Wilayah desa biasanya cukup sempit, dihuni oleh banyak keluarga dan kebanyakan mata pencaharian penduduk adalah petani serta tingkat pendidikan mereka tergolong rendah.⁵

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwasanya desa adalah bagian terkecil dalam sistem pemerintahan dari suatu negara yang tercipta dari sejumlah keluarga yang hidup dalam satu wilayah tertentu dimana seorang kepala desa yang menjadi kepala keluarganya sebagai penanggung jawab dalam mengelola roda pemerintahan dan kehidupan masyarakatnya. Secara umum jumlah penduduk desa lebih sedikit dibanding penduduk kota dimana mayoritas penduduk desa bergantung pada sumber daya alam yang terdapat disekitar wilayahnya.

Ada beberapa karakteristik desa yang membuatnya berbeda dengan kota, yakni pertama lokasi geografis desa sangat jauh dari kota menggambarkan bahwasanya kehidupan masyarakat menyatu dengan alam. Kedua mayoritas penduduk desa bekerja di ladang sehingga bergantung pada iklim. Ketiga sebagai unit pemerintahan terkecil dalam sebuah negara, desa memiliki ciri khas berupa kesatuan sosial dan sumber daya tenaga kerja. Terakhir ekonomi desa sangat bergantung pada mata pencaharian penduduknya, memprioritaskan dan memegang erat aturan agama dan adat istiadat.⁶

⁵ Erwin Setyadi, *Panduan Penggunaan Dan Pengelolaan Dana Desa* (Jakarta: PT. Grasido, 2010).2

⁶ Icuik Rangga and Erwin Setyadi, *Optimalisasi Potensi Desa Di Indonesia* (Jakarta: PT. Grasindo, 2019).4

Selain itu, desa juga memiliki potensi. Kekuatan desa terletak pada seluruh sumber daya alam serta sumber daya manusia yang dimilikinya. semua sumber daya dapat dikelola serta dimanfaatkan untuk penunjang keberlangsungan hidup serta perkembangan desa. Beberapa sumber daya desa diantaranya yang pertama, masyarakat desa yang terbiasa menjalani kehidupan bergotong royong menjadi ketangguhan dalam pembangunan desa. Kedua, aparatur desa yang selalu bekerja dengan penuh kesungguhan dalam mewujudkan keamanan dan kelancaran dalam bidang pemerintahan desa. Terakhir, lembaga sosial yang senantiasa memotivasi penduduk untuk berperan aktif dalam pembangunan desa.⁷

Potensi desa jika dikelola dan dimanfaatkan dengan tepat maka bisa menjadi pondasi pembangunan desa secara berkelanjutan. Untuk mewujudkan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan desa, masyarakat, aparatur desa dan lembaga sosial diwajibkan bergotong royong untuk berkontribusi dalam memanfaatkan potensi-potensi yang dimilikinya.

a. Sumber Pendapatan Desa

Desa memperoleh pendapatan dari berbagai sumber salah satunya adalah dana desa yang berasal dari APBN yang akan diulas lebih lengkap pada bagian berikutnya. Selain dana desa, juga terdapat sumber pendapatan desa yaitu sebagai berikut:

1.) Anggaran Dana Desa(ADD)

Sumber pendapatan desa selain dana desa yang pertama adalah Anggaran Dana Desa(ADD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD). Anggaran Dana Desa berfokus pada bidang pelaksanaan pemerintahan desa seperti penghasilan tetap(siltap) kepala desa dan perangkat desa, penghasilan tetap BPD, operasional pemerintahan desa, operasional BPD, iuran BPJS Kesehatan dan iuran BPJS Ketenagakerjaan. Berikut merupakan besaran Anggaran Dana Desa yang diperoleh Desa Awo'Gading pada tahun 2020-2025.

⁷ Syafrie, *Pengantar Ilmu Pemerintahan* (Bandung: Refika Aditama, 2011).97

Tabel 2.1 Total Penerimaan Anggaran Dana Desa(ADD) tahun 2020-2024

No.	Tahun	Nominal (Rp)
1.	2020	305.608.000,00
2.	2021	301.689.000,00
3.	2022	305.241.000,00
4.	2023	324.540.000,00
5.	2024	343.596.000,00
6.	2025	376.649.000,00

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa terdapat penurunan anggaran dana desa dari tahun 2020 ke 2021. Pada tahun selanjutnya Kembali naik dan di tahun 2023 mengalami peningkatan yang signifikan. 2024 pendapatan masih terus meningkat dan pada tahun 2025 juga mengalami peningkatan.

2.) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHP)

Pendapatan desa juga berasal dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah(BHRD). BHRD berfokus pada bidang pembinaan masyarakat desa seperti pembinaan PKK, pembinaan kepemudaan dan karang taruna dan pemeliharaan jalan desa. Berikut merupakan besaran BHRD yang diterima oleh Desa Awo'Gading.

Tabel 2.2 Total Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah(BHRD) tahun 2020-2024

No.	Tahun	Nominal (Rp)
1.	2020	16.463.635,00
2.	2021	14.178.120,00
3.	2022	14.798.769,00
4.	2023	17.573.849,00
5.	2024	27.105.972,00

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa

3. Dana Desa

a. Pengertian Dana Desa

Dana Desa merupakan alokasi dari APBN yang diperuntukkan bagi desa. Dana ini digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan, mulai dari penyelenggaraan pemerintahan hingga pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.⁸

Dana desa merupakan sumber daya finansial yang dapat berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dana desa dipergunakan untuk membangun ekonomi desa sampai ke pelosok.⁹

b. Tujuan Dana Desa

Pemerintah kabupaten memberikan Dana Desa sebagai wujud komitmen untuk memajukan perekonomian desa, dengan tujuan dan sasaran yang jelas. Pemanfaatan dana ini difokuskan pada pendanaan kegiatan pemerintah desa dalam menjalankan program-program yang bertujuan memperkuat masyarakat. Tujuan utama dari Dana Desa adalah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan, menyediakan layanan publik yang memenuhi standar umum, serta meningkatkan kesejahteraan seluruh warga desa. Secara lebih rinci, Dana Desa bertujuan untuk:

- 1.) Mengoptimalkan layanan publik pada sektor pemerintahan
- 2.) Menekan angka kemiskinan
- 3.) Menunjang dan mengembangkan ekonomi desa
- 4.) Menangani disparitas perkembangan dengan desa lain
- 5.) Meningkatkan kontribusi masyarakat dalam pembangunan desa.

Alokasi Dana Desa yang diterima oleh pemerintah desa adalah sebesar 10% dari dana transfer daerah, yang didistribusikan secara bertahap dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, dan kondisi geografis desa.¹⁰

d.) Penggunaan Dana Desa

⁸ Muhammad Muiz Raharjo, *Pengelolaan Dana Desa* (Jakarta: Bumi Aksara, 2020).13

⁹ Maryunani, *Ekonomi Pedesaan* (Malang: UB Press, 2020).86

¹⁰ Kemenkeu RI, *Buku Saku Dana Desa* (Jakarta: DJPK, 2017).6

Dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, dana desa dipergunakan untuk berbagai tujuan, termasuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan masyarakat.

Prinsip-prinsip pemanfaatan dana desa:

- 1.) Dana desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dimanfaatkan untuk mendukung pekerjaan-pekerjaan kewenangan yang dimiliki desa, yang diatur serta dikelola oleh pemerintah desa itu sendiri.
- 2.) Fokus utama dana desa adalah untuk membiayai pelaksanaan program pembangunan serta pemberdayaan masyarakat..
- 3.) Anggaran dana desa harus dialokasikan berdasarkan kebutuhan sesuai kesepakatan saat musdes.

Adapun urgensi dalam program pembangunan meliputi:

- a.) Tujuan utama pembangunan desa adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Ini dapat dicapai melalui penetapan langkah strategis.
- b.) Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat desa, misalnya melalui program pengembangan dan peningkatan layanan pos kesehatan, pengelolaan dan pengembangan posyandu sebagai sarana kesehatan masyarakat.
- c.) Pembangunan infrastruktur desa seperti pembangunan jalan untuk memfasilitasi kegiatan masyarakat, pemeliharaan sistem air bersih secara berkala, perbaikan saluran irigasi untuk membantu sektor pertanian, konstruksi serta pengelolaan sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan, pemeliharaan fasilitas sanitasi lingkungan untuk menjaga masyarakat tetap bersih dan sehat, pengembangan infrastruktur dan fasilitas umum untuk mendukung aktivitas masyarakat.
- d.) Pengembangan potensi ekonomi lokal, seperti mendirikan dan mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk menunjang ekonomi desa, mendukung pertanian lokal melalui pemberian bantuan pupuk dan pakan serta mengembangkan sektor pariwisata desa yang bisa menjadi ladang pendapatan masyarakat.

e.) Penggunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat juga harus diprioritaskan. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan beberapa langkah yaitu:

- (1) Mengoptimalkan kualitas perencanaan untuk memastikan bahwa program yang berjalan sesuai dengan kebutuhan desa dan mendukung program dalam bidang perekonomian yang dikelola oleh BUMDes ataupun kelompok lain.
- (2) Membentuk dan meningkatkan kemampuan kader pemberdayaan masyarakat agar mereka dapat berperan aktif dalam pembangunan desa serta mengadakan promosi kesehatan dengan membina pola hidup bersih serta sehat dilingkungan masyarakat.
- (3) Meningkatkan kemampuan kelompok masyarakat lewat berbagai program yang ditujukan untuk kelompok ekonomi produksi, kelompok wanita, kelompok petani, kelompok masyarakat dengan pendapatan rendah, kelompok pengerajin, kelompok yang memerhatin dan melindungi anak, kelompok pemuda dan kelompok lain sesuai dengan keadaan desa.¹¹

e.) Pengelolaan Dana Desa

Satu diantara langkah pemerintah ketika mengoperasikan tata laksana dengan benar saat manajemen dana desa adalah dengan pengaturan dana desa. Sudah menjadi kewajiban bagi aparat desa untuk mengadakan pertemuan dengan warga sebelum melaksanakan pengelolaan dana desa yang mana hasil dari musyawarah tersebut yang menjadi pedoman pemerintah desa dalam mengambil kebijakan demi kesejahteraan seluruh masyarakat. Kebutuhan masyarakat desalah yang juga perlu diperhatikan agar program yang berbasis desa ini dapat terealisasi secara efektif sehingga rasa keadilan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat setempat.

Dana desa dalam pengelolaannya terdapat beberapa hal yang menjadi dasar dalam perealisasiannya, yaitu sebagai berikut:

1.) Asas-asas Pengelolaan Dana Desa

a.) Transparan

¹¹ Marza Twendo, *Kumpulan Perundang-Undangan Di Indonesia* (Jakarta: Visimedia, 2017).6

Transparansi dalam hal ini berarti adanya keterbukaan yang mengakomodasi warga dalam memperoleh informasi mengenai finansial desa, tidak ada yang ditutup-tutupi oleh pihak pengelola keuangan sehingga semua masyarakat mengetahui proses pemanfaatannya. Dalam perspektif Islam, transparansi juga sangat ditekankan. Seperti yang dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah(2) ayat 282 yang berbunyi:

... وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ ...

Terjemahnya:

...Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis,...

Ayat ini merupakan perintah agar pencatatan administrasi dilakukan secara transparan. Dalam konteks dana desa, hal ini menjadi kewajiban aparat desa agar pengelolaan dana dilaporkan secara detail agar penyimpangan tidak terjadi.

b.) Akuntabel

Proses manajemen finansial desa harus direalisasikan dengan akuntabel, yaitu mempertanggungjawabkan seluruh proses pengaturan dan pengevaluasian sumber daya hingga prosedur yang diterapkan saat perealisasi program sesuai dengan ketentuan perencanaan untuk mendapatkan hasil yang sepadan.

c.) Partisipatif

Partisipatif menekankan tata kelola pemerintahan haruslah melibatkan partisipasi dari masyarakat. Dimana masyarakat hendaknya berperan aktif dalam memberi masukan kepada pemerintah mengenai apa yang dibutuhkan dan apa yang menjadi potensi desa.

d.) Tertib dan Disiplin Anggaran

Keuangan desa tidak bisa dikelola dengan semena-mena ataupun sesuka hati siapapun, melainkan harus merujuk pada pedoman dan aturan sebagai paradigma pengelolaan dana desa.¹²

Hal ini juga ditegaskan dalam Q.S Al-Baqarah(2) ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

Ayat ini sangat menekankan agar dana desa digunakan dengan benar, tindak penyalahgunaan dana sangat dilarang dalam Islam.

2.) Pengelolaan Keuangan Desa

Kegiatan pengelolaan dana mencakup:

a.) Perencanaan

Kegiatan perencanaan dalam mengelola keuangan desa merupakan langkah awal dalam menargetkan tujuan yang ingin dicapai yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan dana desa diawali dengan penyusunan rencana untuk menentukan program atau tujuan yang ingin diwujudkan. Perencanaan dilakukan agar pada saat pelaksanaan pengelolaan dana, pemerintah tidak berjalan tanpa arah, melainkan menuju pada tujuan yang sebenarnya yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Ditahap ini pula pemerintah desa mengambil keputusan mengenai kebijakan seperti apa yang akan diterapkan agar program dapat terealisasi dengan efektif dan efisien.

b.) Pelaksanaan

¹² Rosy Armaini, "Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Pencapaian Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa Di Desa Karang Agung Kabupaten Pati," *Jurnal ACSY: Jurnal Accounting Politeknik Sekayu* 6 (2017): 57.

Tahap selanjutnya setelah melakukan perencanaan yang matang adalah pelaksanaan. Dimana kegiatan pelaksanaan adalah aktualisasi atau pengaplikasian rencana yang sudah ditentukan sebelumnya. Pelaksanaan pengelolaan dana desa dilakukan berdasarkan peraturan desa yang berlaku untuk seluruh rangkaian tata kelola dalam semua bidang termasuk aspek pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

c.) Penatausahaan

Penatausahaan merupakan pencatatan seluruh rangkaian proses pengelolaan finansial desa yang dikerjakan oleh kaur keuangan dimana sebelumnya sudah ditentukan oleh pemimpin desa yakni kepala desa. Semua aktivitas yang relevan dengan pelaksanaan manajemen keuangan dikelola pada bagian ini.

d.) Pelaporan

Kegiatan pelaporan merupakan interpretasi dari penatausahaan yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu pengelolaan dan pencatatan laporan pelaksanaan keuangan desa yang kemudian diberitahukan kepada semua khalayak.

e.) Pertanggungjawaban

Tahap terakhir dalam pengelolaan keuangan desa adalah pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban dalam hal ini berarti pihak pengelola wajib mempertanggungjawabkan seluruh aset yang telah dimanfaatkan pada kegiatan pembangunan.¹³

3.) Tantangan Implementasi Pengelolaan Dana Desa

Penyaliaan dana desa adalah satu dari program startegis pemerintah dalam memacu pembangunan juga kesejahteraan di pedesaan. Terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaan dana desa yang menjadi kendala mewujudkan tujuan yang diharapkan, baik dari sisi administrative, transparansi dan efektivitas.

a.) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Salah satu dari sekian banyaknya tantangan pengelolaan dana desa yang paling krusial adalah keterbatasan sumber daya manusia di tingkat desa. tidak

¹³ Muhammad Mu'iz Raharjo, *Pengelolaan Dana Desa* (Jakarta: Bumi Aksara, 2021).

sedikit dari perangkat desa yang belum memiliki keterampilan dan pengetahuan yang mumpuni dalam mengelola keuangan desa serta administrasi sehingga berisiko menghambat proses perencanaan, pelaksanaan sampai tahap pelaporan.

b.) Keterbatasan Infrastruktur teknologi

Pemerintah telah mengembangkan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) untuk memfasilitasi pengelolaan keuangan, namun di beberapa wilayah infrastruktur teknologi masih sangat terbatas. Beberapa desa terkhusus di daerah terpencil mengalami kesulitan dalam mengakses dan memanfaatkan sistem digital yang diperlukan.

c.) Kurangnya Pemahaman Masyarakat

Dana desa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat namun masyarakat kerap kali tidak memahami dan tidak memiliki kesadaran mengenai hal tersebut. Oleh karena itu, pengelolaannya menjadi kurang efektif dikarenakan kurangnya literasi masyarakat dalam hal keuangan serta minimnya partisipasi dari masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

d.) Potensi Penyalahgunaan Dana Desa

Dana desa dialokasikan memiliki tujuan khusus demi masyarakat namun penyalahgunaan merupakan suatu masalah yang masih banyak dijumpai. Penyimpangan yang terjadi biasanya dimotivasi oleh kepentingan tertentu, sehingga manipulasi laporan keuangan terjadi. Ada sejumlah penyebab, termasuk kurangnya pengawasan internal di tingkat desa, minimnya akuntabilitas serta kurangnya pengawasan dari pihak eksternal.

e.) Keterbatasan dalam Perencanaan dan Pengawasan

Perencanaan dan pengawasan yang kurang baik sering menjadi masalah bagi pengelolaan dana desa. Pemanfaatan dana desa bisa saja tidak efektif dan tidak tepat sasaran tanpa perencanaan yang baik. Pengawasan yang minim juga menyebabkan penggunaannya menjadi tidak transparan

f.) Ketidaksesuaian dengan Kebutuhan Masyarakat

Idealnya dana desa ditujukan untuk penyelenggaraan program-program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Kenyataan dilapangan kerap kali berbeda, terkadang terjadi ketidakselarasan antara prioritas Pembangunan dengan alokasi dana yang ada. Kurangnya identifikasi kebutuhan masyarakat desa dan ketidaksesuaian antara kebijakan pemerintah daerah dengan kebutuhan masyarakat desa dapat menjadi penyebabnya.¹⁴

4. Pembangunan Infrastruktur

a. Pengertian Pembangunan

Pembangunan adalah sebuah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, maka elemen manusia harus menjadi fokus utama. Pembangunan merupakan tahapan yang dimulai dari kenyataan menuju desiderita yakni langkah demi langkahnya membimbing siapapun menuju dimensi yang jauh lebih baik dan meningkatnya mutu kehidupan.¹⁵

Pembangunan dapat diartikan sebagai usaha yang dilakukan suatu organisasi untuk mewujudkan masyarakat yang lebih berkualitas serta melalui proses dinamis dalam mencapai kesejahteraan yang dilakukan secara berkelanjutan.¹⁶

Pembangunan, menurut Bintoro Tjokroamidjojo adalah sebuah reformasi serta kemajuan dari sebuah kondisi tertentu kekeadaan yang dinilai mengalami peningkatan dari kondisi sebelum adanya pembangunna bisa juga dikatakan sebagai suatu keadaan masyarakat yang lebih diinginkan.¹⁷

Merujuk pada pendapat para ahli yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa pembangunan pada intinya merupakan sebuah rangkaian usaha maupun upaya yang dilakukan oleh suatu organisasi melalui proses perubahan secara dinamis dan berkelanjutan menuju pada kondisi yang lebih baik hingga

¹⁴ Henny Zurika Lubis, *Siskeudes: Inovasi Digital Dalam Pengelolaan Dana Desa* (Medan: Umsu Press, 2025).27

¹⁵ Basuki Pojualwanto, *Perekonomian Indonesia: Tinjauan Historis, Teoritis, Dan Empiris* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014).121

¹⁶ Tesyalom Sembel, Rony Gosal, and Sofia Pangemanan, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa(Studi Di Desa Singsong Barat Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow)," *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* Volume 1 (2017).

¹⁷ Bintoro Tjokroamidjojo, *Pengantar Administrasi Pembangunan* (Jakarta: LP3ES, 1974).189

mencapai kesejahteraan berlandaskan norma-norma tertentu yang memungkinkan meningkatnya produktifitas sehingga dapat meningkatkan taraf hidup seluruh masyarakat.

b. Faktor-Faktor Pembangunan

1.) Sumber Daya Manusia(SDM)

SDM memainkan peran yang sangat krusial dalam proses pembangunan karena sumber daya manusia adalah yang menentukan seberapa cepat atau lambatnya proses pembangunan yang dijalankan.

2.) Sumber Daya Alam(SDA)

Mayoritas negara yang belum maju bergantung pada aset alam yang dimilikinya untuk menjalankan pembangunan. Namun sumber daya alam yang memadai belum bisa menjamin keberhasilan pembangunan jika tidak dibarengi dengan keterampilan sumber daya manusianya untuk memanfaatkan kekayaan alam yang telah tersedia seperti kesuburan tanah, kekayaan tambang, mineral, hutan dan hasil laut.

3.) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi(IPTEK)

Kemajuan IPTEK makin hari makin cepat mendorong terjadinya akselerasi aktivitas ekspansi. Bergantinya metode pekerjaan yang pada awalnya menggunakan tenaga manusia menjadi mesin-mesin berteknologi tinggi memungkinkan proses pembangunan menjadi efisien dan dari segi kuantitas dan kualitas pun akan turut meningkat.

4.) Budaya

Pembangunan ekonomi juga dipengaruhi oleh budaya, faktor ini menjadi salah satu faktor pendukung dalam proses Pembangunan, Dimana budaya bisa menjadi suatu dorongan suatu individu untuk memiliki sikap pekerja keras, kerja cerdas, jujur dan ulet. Namun bukan hanya menjadi faktor pendukung, budaya juga terkadang menjadi faktor penghambat pembangunan seperti sikap anarkis, egois, boros, dan KKN(Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

5.) Sumber Daya Modal

Sumber daya modal berperan penting dalam perkembangan juga kelancaran Pembangunan ekonomi karena sumber daya modal inilah yang menjadi penentu produktivitas dari pekerjaan yang dilakukan. Untuk memastikan kelancaran prosesnya, dibutuhkan sumber daya intelektual yang berintegritas untuk mengelola aset-aset tersebut serta untuk mengupgrade IPTEK.¹⁸

c. Aspek-Aspek Pembangunan

Salah satu tujuan pembangunan desa adalah untuk meniadakan kesenjangan antara masyarakat dengan pemerintah. Sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk menyediakan sarana dan prasarana untuk masyarakat, namun selebihnya terserah bagaimana masyarakat memanfaatkannya menggunakan keterampilan mereka masing-masing.

Aspek-aspek pembangunan desa yakni:

1.) Pembangunan Sebagai Suatu Proses

Dengan tekanan aspek perubahan sosial dan psikologis, pembangunan adalah sebuah proses yang mendefinisikan pembangunan berkelanjutan yang menghasilkan kualitas hidup yang baik. Artinya, pembangunan sebagai suatu proses menentukan berlangsungnya proses pembangunan yang dilahirkan dari kehidupan yang lebih baik. Hal tersebut tercermin dari peningkatan kualitas hidup manusia dengan melihat problematika perubahan, baik itu perubahan sikap maupun perubahan lain yang memiliki pengaruh.

2.) Pembangunan Sebagai Suatu Metode

Pembangunan juga digunakan untuk membangun masyarakat untuk memiliki kapasitas atau keterampilan juga sebagai suatu metode yang digunakan untuk melangkah menuju ekspansi desa tanpa adanya kesenjangan diantara sesama demi terwujudnya hidup yang lebih sejahtera.

3.) Pembangunan Sebagai Suatu Program

Pembangunan dapat menjadi program peningkatan taraf hidup masyarakat pedesaan dengan memprioritaskan kegiatan pada bidang yang mendasar seperti pendidikan, pertanian, kesehatan, koperasi dan industri rumah tangga.

¹⁸ Pojualwanto, *Perekonomian Indonesia: Tinjauan Historis, Teoritis, Dan Empiris*.121

Jika paraf hidup telah mengalami peningkatan, maka dapat dipastikan kesejahteraan masyarakat pun akan ikut meningkat.

4.) Pembangunan Sebagai Suatu Gerakan

Hakikatnya, inti dari setiap usaha pembangunan adalah mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia yakni terciptanya masyarakat yang adil dan makmur, sejalan dengan nilai-nilai yang termaktub dalam Pancasila serta UUD 1945. Secara spesifik, pembangunan pedesaan merupakan serangkaian inisiatif dan proyek multiaspek yang dijalankan oleh pemerintah daerah, pemerintah kota, serta partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat.¹⁹

Oleh sebab itu, sinergitas dan kordinasi yang kuat antara semua pihak menjadi krusial demi menjamin pelaksanaan proyek agar efektif dan efisien.

d. Tahapan Pembangunan Desa

Dalam pelaksanaannya, pembangunan desa hendaknya dilakukan dengan berpijak pada asas transparansi. Selain itu, perlu juga mengikutsertakan masyarakat pada seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pemantauan hasilnya.

Pembangunan yang diselenggarakan pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai programnya. Dana tersebut harus dimanfaatkan secara efektif dan bertanggung jawab.

Tahapan Pembangunan desa meliputi beberapa langkah yang tentunya tidak boleh dianggap remeh dalam setiap prosesnya, adapun tahapan pembangunan yaitu sebagai berikut:

1.) Perencanaan

Adanya rencana yang baik, penyusunan langkah, visi misi yang pasti, memikirkan modal dengan akurat dan menentukan tujuan yang jelas akan membuat proses yang dijalankan dapat berjalan mulus tanpa kendala.²⁰

¹⁹ Nova Sulastris, "Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakopodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Halu Oleo Kendari*, 2016, 16.

²⁰ Hendra Safri, *Pengantar Ilmu Ekonomi* (Palopo: Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo, 2018).62

Pada mulanya, proses ekspansi desa dimulai dengan tahap perencanaan. Pemerintah desa bertanggungjawab melaksanakan tahapan ini, yang mana dalam pelaksanaannya, BPD dan berbagai elemen masyarakat wajib diundang untuk memberikan partisipatif mengenai pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki oleh desa untuk mencapai tujuan utama pembangunan desa. Adapun tahapan penyusunan dari perencanaan Pembangunan desa yaitu rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu enam tahun dan rencana kerja pemerintah desa (RKP) untuk jangka waktu satu tahun.

a.) Penyusunan RPJM Desa

Rencana Pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) diputuskan tiga bulan dari hari pelantikan kepala desa. Isi dari RPJMDes meliputi visi dan misi kepala desa, serta berbagai rencana ekspansi desa, pemberdayaan dan pembinaan masyarakat. Terdapat beberapa bidang pelaksanaan pembangunan desa yaitu pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur lingkungan desa, sarana dan prasarana kesehatan desa, pendidikan dan kebudayaan, ekonomi, pengembangan usaha ekonomi produktif, pelestarian lingkungan hidup, bidang pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Adapun langkah langkah dalam penyusunan RPJMDes yakni:

(1) Pembentukan tim penyusun RPJMDes

Tim penyusunan RPJMDes ada tujuh sampai sebelas orang yang dipimpin oleh kepala desa. Menurut penelitian, semakin baik pemimpin dalam melaksanakan tanggungjawabnya, maka komitmen pegawai terhadap organisasi juga akan semakin maksimal. Oleh karena itu, setiap pemimpin wajib memastikan kondisi pegawainya secara teratur serta menjaga hubungan baik agar dapat memberikan kinerja terbaiknya.²¹

(2) Pengarahan kebijakan perencanaan

Tahapan ini dilaksanakan oleh tim yang telah dibentuk pada tahapan sebelumnya yang kemudian kita kenal dengan tim penyusun yang mengacu

²¹ Mahadin Shaleh, *Kepemimpinan Dan Organisasi* (Palopo: Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo, 2018).

pada analisis data dari RPJM Kabupaten, rencana strategis untuk satuan kerja perangkat daerah dan rencana pembangunan wilayah pedesaan.

(3) Pengkajian kondisi desa

Hasil dari pengkajian kondisi desa yang dilakukan oleh tim RPJMDes yaitu penyesuaian data desa dengan observasi gagasan masyarakat dalam melihat potensi dan masalah yang dialami desa serta penyusunan laporan hasil kajian kondisi desa.

(4) Penyusunan rencana Pembangunan dengan musyawarah desa

Tahapan ini dilaksanakan oleh BPD, tim penyusun RPJMDes dan masyarakat setempat. Musyawarah ini nantinya akan menghasilkan berita acara penyusunan rancangan RPJM Desa yang lampirannya berisi hasil kajian kondisi desa, perumusan arah Pembangunan dan rencana prioritas pembangunan desa.

(5) Penyusunan rancangan RPJM Desa

Hasil dari langkah ini adalah rancangan RPJM Desa yang telah dimufakati oleh kepala desa. kemudian, melalui musyawarah rencana pembangunan desa rancangan tersebut disepakati oleh peserta musyawarah yang telah dilakukan sebelumnya sehingga dapat ditetapkan menjadi RPJM Desa.

(6) Penetapan RPJM Desa

Penetapan RPJM dilaksanakan oleh kepala desa dan BPD. Tahapan ini berisi penyepakatan rancangan RPJM Desa oleh kepala desa dan BPD agar nantinya disahkan sebagai RPJM Desa.

2.) Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa

Pelaksanaan Pembangunan nantinya akan dikelola oleh kepala desa yang kemudian akan dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan. Beberapa tahapan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan desa yaitu:

a.) Penetapan pelaksana kegiatan

Pelaksana kegiatan dipilih oleh kepala desa yakni orang yang dianggap dapat dipercaya dan diandalkan yang kemudian nantinya akan membantu kepala desa dalam mempersiapkan dan merealisasikan kegiatan didesa.

b.) Persiapan dokumen

Tahapan ini terdiri dari penyiapan dokumen kesediaan masyarakat untuk menerima dampak dari kegiatan Pembangunan yang ditimbulkan, penyiapan dokumen ganti rugi bagi masyarakat yang terdampak pembangunan dan laporan hasil analisis dampak lingkungan dan social dari kegiatan Pembangunan.

c.) Pengadaan tenaga kerja dan bahan material

Pelaksana kegiatan adalah penanggungjawab dalam tahapan ini namun tetap ada bantuan dari masyarakat setempat. Jenis dan jumlah tenaga kerja disesuaikan dengan perencanaan yang telah ditetapkan pada tahapan sebelumnya agar tidak terjadi kendala dalam tahapan ini.

d.) Tahapan pelaksanaan kegiatan

Tahapan ini dipimpin langsung oleh kepala desa tahapan ini biasanya berisi musyawarah yang membahas pelaksanaan kegiatan yang dimana kepala desa sebagai pemimpin rapat dan pelaksana program yang menjadi anggota rapat. Dalam rapat ini membahas perkembangan kegiatan, keluhan masyarakat, tantangan atau hambatan yang dialami serta target kegiatan.

e.) Penanganan masalah

Penanganan masalah perlu dipersiapkan untuk menghadapi hal-hal diluar perkiraan yang mungkin dapat terjadi. Proses penyelesaian masalah dilaksanakan secara kekeluargaan agar tidak terjadi permasalahan antara kedua belah pihak agar program dapat terus berjalan berdasarkan rencana/ Pemerintah juga harus melihat dari sudut pandang masyarakat dan mendengarkan apa yang menjadi aduan atau keluhan mereka.

f.) Penyusunan laporan kegiatan

Tahapan yang wajib dilakukan oleh pelaksana kegiatan adalah membuat laporan mengenai perkembangan pembangunan kepada pimpinan. Laporan tersebut berisi realisasi biaya dan bukti pembayaran, dokumentasi progress aktivitas pembangunan fisik dari kondisi 0%, 40%, 80%, hingga 100%, dokumentasi kontribusi masyarakat dalam kegiatan, prmbayaran kepada tenaga kerja serta dokumentasi paska Pembangunan infrastruktur desa.

3.) Pemantauan dan pengawasan Pembangunan desa

Pemerintah desa dibawah naungan pemerintah daerah bertugas melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pembangunan yang telah berlangsung. Adapun bentuk pengawasan dari pemerintah daerah terhadap pembangunan desa yaitu:

- a.) Memantau jadwal yang ditetapkan pada perencanaan juga pelaksanaan program
- b.) Menganalisis laporan mengenai progress pelaksanaan kemudian memberikan masukan yang relevan.
- c.) Melakukan evaluasi terhadap kemajuan pembangunan
- d.) Menyediakan panduan terhadap pemerintah desa mengenai pembangunan desa.²²
- e. Hambatan Pembangunan Desa

Pembangunan merupakan paya yang dilakukan secara terukur dan bertahap dengan menggunakan sumber daya yang tersedia untuk menangani masalah yang ada dalam rangka mencapai keadaan yang lebih baik dibanding keadaan sekarang ini. Ketidakidealan kondisi saat ini merupakan faktor utama diadakannya pembangunan. Dalam pelaksanaan pembangunan bukan tidak mungkin pelaksana akan menjumpai berbagai permasalahan. Namun, seharusnya berbagai permasalahan yang muncul tersebut bukan menjadi penghalang jalannya kegiatan dan bisa diantisipasi serta diberi perhatian khusus agar pembangunan desa tidak mengalami kendala yang signifikan dalam pelaksanaannya. Adapun permasalahan yang kerap kali muncul dalam pembangunan desa yaitu:

- 1.) Sumber daya manusia yang memadai sangat terbatas;
- 2.) Keterbatasan sumber pembiayaan;
- 3.) Kelembagaan social-ekonomi belum berperan secara aktif;

²² Gunawan Prayitno and Aris Subagiyo, *Pembangunan Desa: Merencanakan Desa Dengan Pendekatan Partisipatif Dan Berkelanjutan* (Malang: UB Press, 2018).

4.) Minimnya partisipasi dan kreatifitas masyarakat.²³

B. Penelitian Terdahulu

Peninjauan ini dilakukan untuk mengetahui kesamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian ini sehingga dapat dirumuskan perbedaan yang mendasar diantara penelitian-penelitian tersebut. Dengan melihat latar belakang, penulis memusatkan pada efektivitas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur di Desa Awo'Gading. Penulis memilih penelitian-penelitian berikut dikarenakan objek yang diteliti menyerupai fokus penelitian peneliti.

1. Skripsi berjudul Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Palakka Kabupaten Barru yang ditulis oleh Sugiarti pada tahun 2024. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menggambarkan manajemen pengelolaan dana desa, kedua menjabarkan apa saja hambatan penataan dana desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Palakka dan menguak efektivitas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan Pembangunan infrastruktur di desa Palakka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Indikator yang digunakan dalam mengukur efektivitas dalam penelitian ini yang pertama adalah produktif, yakni kemampuan dalam menghasilkan output dari program yang telah direncanakan. Indikator kedua yaitu efisiensi yang menekankan pemanfaatan sumber daya seminimal mungkin dengan hasil semaksimal mungkin. Ketiga, kepuasan dalam artian tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil Pembangunan dan manfaat yang dirasakan masyarakat. Keempat adaptasi, yakni kemampuan dalam menghadapi perubahan yang menjadi hambatan sehingga pembangunan tetap berjalan secara efektif. Indikator terakhir yaitu pengembangan, yaitu usaha untuk mengembangkan kegiatan agar hasilnya lebih optimal. Informan dalam skripsi tersebut adalah pihak pemerintah desa, masyarakat desa dan BPD. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di desa Palakka telah terlaksana

²³ Nova Sulastri, "Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa(ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna" (Universitas Halu Oleo Kendari, 2016).

dengan baik, hal ini dapat dilihat dari pengelolaan dana desa yang memenuhi indikator sehingga dapat dikatakan sudah efektif, hambatan pengelolaan dana desa berasal dari Sumber daya alam(SDA) yaitu cuaca, sementara faktor lainnya yaitu sumber daya manusia(SDM).²⁴

2. Jurnal Rahmat dkk yang berjudul Efektivitas Kebijakan Dana Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur yang diteliti pada tahun 2021. Tujuannya adalah menguak bagaimana efektivitas kebijakan dana desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Rompu, Masamba, Luwu Utara. Penelitian dengan pendekatan fenomenologi dengan paradigma interpretif. Indikator untuk mengukur penelitian ini meliputi aspek kebijakan, tepat target, tepat pelaksana dan tepat lingkungan. Sedangkan informan dalam penelitian adalah masyarakat Desa Rompu, aparat desa dan pihak lain yang memahami dan terlibat langsung dalam kegiatan tersebut. Peneliti melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi dalam melakukan pengumpulan data. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Efektivitas Pengelolaan dana dinilai sudah tepat dilihat dari ketepatan target, pelaksanaan, kebijakan dan tepat lingkungan.²⁵
3. Efektivitas Pengelolaan Dana Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur pada Gampong Dham Pulo Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar oleh Ahmad Yasir Arafat (2023). Tujuan penelitiannya adalah untuk memahami efektivitas pengelolaan dana desa terkait pembangunan dan melihat faktor penghambatnya. Indikator yang menjadi tolak ukur efektivitas dalam penelitian tersebut adalah ketepatan penentuan waktu, perhitungan biaya, pengukuran keberhasilan, menentukan pilihan, berpikir, melakukan perintah, menentukan tujuan serta sasaran. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, metode pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Informannya mencakup kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa dan elemen

²⁴ Sugiarti, "Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Palakka Kabupaten Barru" (IAIN Pare-Pare, 2024).54

²⁵ Irmansyah, Sri Wahyuni Mustafa, and Rahmat Solling Hamid, "Efektivitas Kebijakan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur," *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2021): 1086–1095, <https://doi.org/10.36778/jesy.v4i2.479>.

masyarakat. Hasil penelitiannya adalah pengelolaan dana desa telah terlaksana secara efektif dilihat dari tahapan perencanaannya melibatkan partisipasi masyarakat. Dalam tahapan pelaksanaannya biaya material yang terbilang banyak menjadi penghambat.²⁶

4. Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan di Desa Bilaporah Tahun 2021 oleh Halimatus dkk (2022) dimana penelitiannya bertujuan untuk melihat efektivitas dari penggunaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan di desa Bilaporah pada tahun 2021. Indikator yang menjadi tolak ukur efektivitas dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga. Pertama tahap perencanaan, yakni keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desaa, ketersediaan dan penyampaian daftar usulan rencana kerja. Kedua tahapan pelaksanaan meliputi pelaksanaan pembangunan berdasarkan hasil musyawarah, pelibatan masyarakat secara langsung (gotong royong) dan ketepatan alokasi anggaran dan realisasi kegiatan. Yang ketiga sekaligus indikator terakhir yakni tahapan pertanggungjawaban meliputi kegiatan pelaporan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban serta evaluasi bersama masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa proses perencanaan dan perealisasi penggunaan dana desa terbilang efektif, pada segmen evaluasi belum beroperasi secara efektif karena tidak terdapat pengevaluasian.²⁷

Tabel 2.3 Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu

No.	Judul (Peneliti)	Perbedaan	Persamaan
1.	Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan	Tujuan utama penelitian tersebut adalah untuk menggambarkan manajemen keuangan desa pada lokasi	Sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dalam metode penelitian.

²⁶ Ahmad Yasir Arafat, "Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Pada Gampong Dham Pulo Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023).40

²⁷ Halimatus Sakdiyah, Ika Lis Mariatun, and Zaiful Arief, "Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Bilaporah Tahun 2021," *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha* 14, no. 1 (2022): 190–93, <https://doi.org/10.0A23887/jjpe.v14i1.0A48427>.

	Pembangunan di Desa Palakka Kabupaten Barru (Sugiarti)	penelitian sedangkan peneltiaan ini akan berfokus pada bagaimana efektivitas pengelolaan dan faktor yang mempengaruhinya. Lokasi juga menjadi salah perbedaan penelitian. Perbedaan ketiga juga terdapat pada indikator atau tolak ukur yang digunakan dalam mengukur efektivitas.	Metode pengumpulain datanya juga sama-sama melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.
2.	Efektivitas Kebijakan Dana Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur (Irmansyah, Sri Wahyuni Mustafa, Rahmat Solling Hamid)	Lokasi Penelitian menjadi perbedaan dalam penelitian ini. Kedua pendekatan yang dilakukan juga berbeda yaitu menggunakan pendekatan fenomenologi dengan paradigma interpretif. Indikator yang digunakan sebagai tolak ukur efektivitas juga berbeda.	Persamaan penelitian ini terletak pada kriteria informannya, kedua tujuan penelitian ini sama-sama berfokus pada bagaimana efektifitas pengelolaan dana. Persamaan juga terletak pada metode pengumpulain data.
3.	Efektivitas Pengelolaan Dana Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur pada	Perbedaan pertama terlihat pada lokasi penelitian dan waktu penelitian. Indikator untuk mengukur	Informan yang diangkat sama-sama berasal dari pihak aparat desa dan masyarakat.

	Gampong Dham Pulo Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar (Ahmad Yasir Arafat)	efektivitas pengelolaan dana desa juga berbeda.	persamaannya juga terletak pada tujuan penelitian, metode pengumpulain data dan pendekatan penelitian.
4.	Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan di Desa Bilaporah Tahun 2021(Halimatus Sakdiyah, Ika Lis Mariatun, Zaiful Arif)	Perbedaan yang menonjol pada peneltian ini adalah lokasi dan waktu penelitian dilakukan.	Indikator dalam mengukur efektivitas sama-sama menggunakan tahapan pembangunan yakni mulai tahapan perencanaan hingga pengawasan. Selain itu pendekatan penelitian narasumber dan metode pengumpulain data juga menjadi persamaan penelitian.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas dapat diketahui yang menjadi kesamaan dengan penelitian ini adalah bersamaan mengkaji efektivitas pengelolaan dana desa dalam program pembangunan desa. Selain itu terdapat persamaan kedua yaitu menggunakan peneltian kulaitatif sebagai pendekatan dalam metode penelitian dan melakukan wawancara, obeservasi dan dokumentasi dalam mengumpulkan data.

Bukan hanya persamaan, dari keempat penelitian terdahulu tersebut tentunya terdapat kesenjangan penelitian. Pertama dari tempat penelitian, untuk pertama kalinya efektivitas pengelolaan dana desa akan dikaji pada Desa Awo'gading. Kedua indikator dalam mengukur efektivitas pengelolaan dana desa dalam pembangunan, keempat penelitian terdahulu memiliki indikator masing-masing yang berbeda dengan penelitian ini dimana penelitian ini akan menggunakan tiga

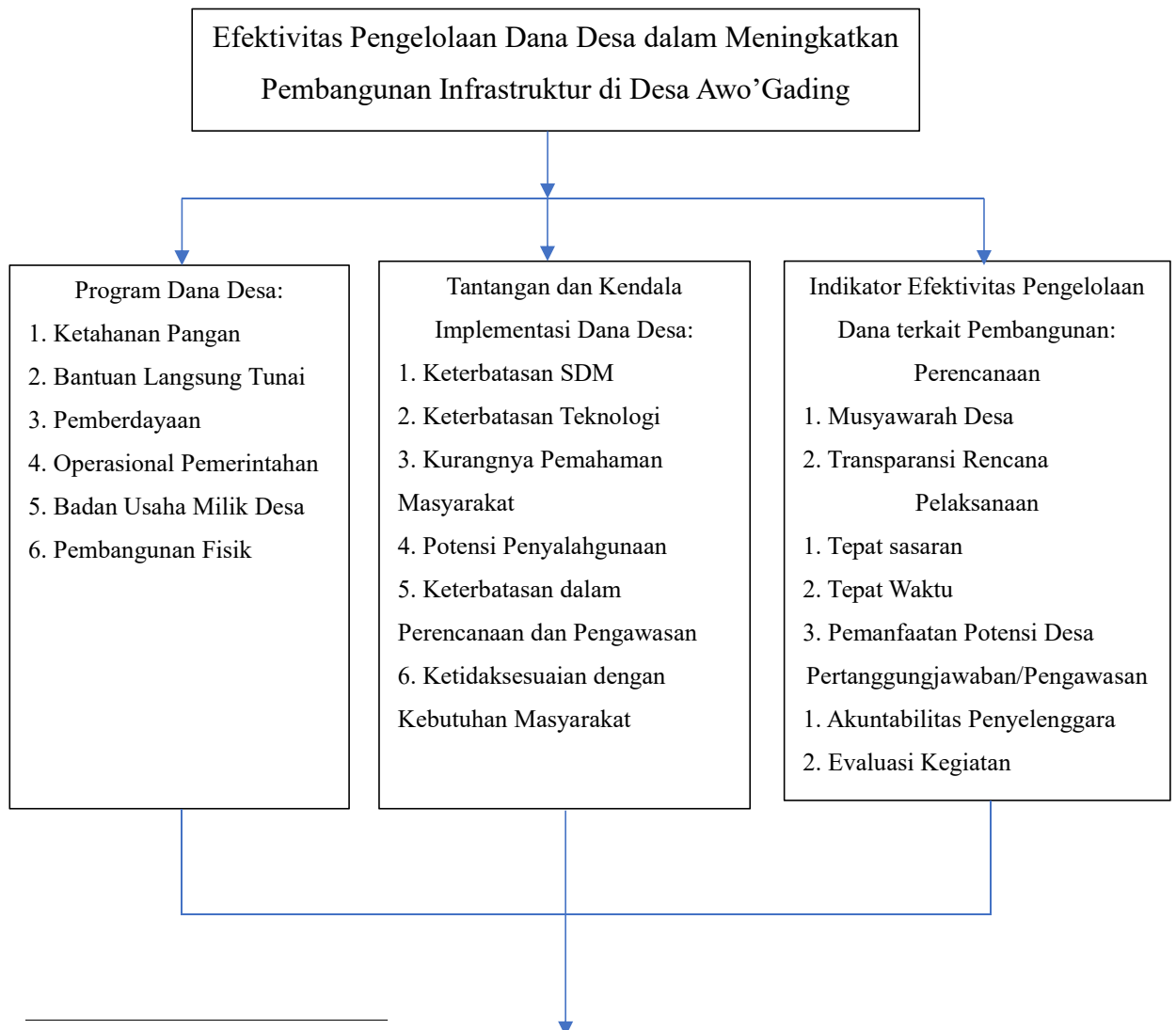
indikator yakni perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Selain itu perbedaan juga terlihat pada waktu pelaksanaan penelitian, dalam keempat penelitian terdahulu dilakukan mulai tahun 2021, 2023 hingga tahun 2024 sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2025.

Keempat penelitian terdahulu yang telah dijelaskan diatas umumnya menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa telah berjalan dengan efektif berdasarkan indikator seperti produktifitas, efesiensi, kepuasan masyarakat, ketepatan target dan tahapan perencanaan-pelaksanaan-pertanggungjawaban. Meskipun menghadapi hambatan seperti cuaca, sumber daya manusia, biaya material dan kurangnya evaluasi, namun penelitian-penelitian ini belum secara eksplisit mengeksplorasi aspek transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan pengawasan sebagai faktor-faktor kunci yang memengaruhi efektivitas pengelolaan dana desa, celah penelitian pun terlihat jelas pada kurangnya analisis mendalam terhadap integrasi aspek-aspek tersebut dalam konteks desa. penelitian ini akan menonjolkan perbedaan yang signifikan karena akan mengintegrasikan dana menganalisis secara eksplisit aspek transparansi, akuntabilitas, Partisipasi dan pengawasan sebagai variable utama untuk mengidentifikasi efektivitas.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran didefinisikan sebagai suatu model konseptual yang menunjukkan teori-teori berkorelasi dengan beberapa elemen terindikasi sebagai permasalahan yang signifikan.²⁸ Landasan gagasan yang menjadi dasar riset ini yaitu bagaimana efektivitas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur di Desa Awo'Gading. Dibawah ini dipaparkan kerangka pemikiran untuk mendukung penelitian.

Bagan 2.1 Kerangka Pemikiran



²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015).283

Hasil Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode yang dipakai pada penelitian ini merupakan metode kualitatif yaitu mengkaji efektivitas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur. Penelitian teknik ini mengumpulkan informasi pada suatu latar ilmiah yang dimaksudkan untuk menginterpretasikan kejadian yang terjadi. Penelitian kualitatif kerap diterapkan dalam penelitian bidang sosial karena hasil penelitiannya didapatkan melalui proses identifikasi dengan mempelajari fenomena-fenomena yang berkaitan dengan objek penelitian, bukan melalui prosedur statistik atau metode kuantifikasi yang mengandung angka-angka. Penelitian kualitatif berupaya memperoleh pemahaman dan pencerahan mengenai suatu fenomena dan ekstrapolasi pada keadaan yang sama.¹

Peneliti memilih jenis penelitian kualitatif karena dianggap dapat memberikan jawaban dari rumusan masalah yang diangkat. Dengan penelitian kualitatif, peneliti akan menjabarkan fokus penelitian melalui pengkajian terhadap fenomena yang menjadi objek penelitian. Penelitian kualitatif menjadi alternatif pada riset ini karena temuan yang didapatkan berasal dari proses identifikasi mendalam terhadap objek dan bukan menggunakan metode statistik.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Desa Awo'Gading, Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu, tepatnya di kantor Desa Awo'Gading. Sedangkan jangka waktu penelitian untuk menyelesaikan riset ini kurang lebih 15 hari(disesuaikan dengan kebutuhan peneliti).

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek riset ini yaitu instansi pemerintahan Desa Awo'Gading dalam mengelola dana desa untuk pembangunan infrastruktur desa. Objek

¹ Albi Anggito and Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018).7-8

penelitiannya adalah informan ataupun narasumber terpilih. Penarikan narasumber dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu mereka yang paling mengetahui permasalahan penelitian yaitu tentang pengelolaan dana desa terkait pembangunan infrastruktur Desa Awo'Gading.

Tabel 3.1 Daftar Narasumber Penelitian

No.	Narasumber	Keterangan	Jumlah
1.	Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara, Kasi Pembangunan	Aparat Desa	4 orang
2.	Warga lokal	Masyarakat	4 orang
Total			8 Orang

Sumber: Data diolah oleh Penulis

Pemilihan informan dilakukan dengan tokoh yang benar-benar memahami permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Seperti pihak aparat desa yakni kepala desa, sekretaris desa, bendahara dan kasi pembangunan. Keempat aparat desa ini diangkat peneliti menjadi informan karena mereka adalah pihak pengelola dana desa sekaligus pelaksana program pembangunan. Aparat desa terlibat langsung dalam setiap tahapan pembangunan maka dari itu mereka menjadi narasumber kunci dalam penelitian. Sedangkan empat orang masyarakat yang dipilih menjadi tambahan informan adalah perwakilan dari masing-masing dusun di desa Awo'Gading, dimana di Desa Awo'Gading terdapat empat dusun sehingga tiap dusun diangkat satu warga lokal yang menjadi narasumber penelitian. Selain itu, keempat warga ini merupakan warga yang memang kerap kali mengikuti kegiatan di desa sehingga mereka tidak asing lagi terhadap program-program yang dilaksanakan oleh pihak pemerintah desa.

D. Teknik Pengumpulan Data

Mengumpulkan data penelitian bisa dikerjakan melalui beberapa cara, sumber dan skema. Merujuk pada metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif, maka teknik yang dipakai pada riset ini yaitu dengan penelitian lapangan yaitu melalui wawancara, observasi atau pengamatan dan dokumentasi.

1. Metode Wawancara

Wawancara adalah salah satu cara memperoleh data pada riset kualitatif yang bersifat mendalam. Dengan wawancara, periset dapat dengan mudah memperoleh temuan yang lebih akurat karena jika terdapat persoalan yang kurang jelas narasumber bisa langsung mempertanyakannya. Peneliti memberikan pertanyaan kepada narasumber lalu narasumber memberikan jawaban atas persoalan tersebut dengan menceritakan kejadian dimasa lalu atau dimasa yang akan datang.

2. Metode Observasi

Observasi terdiri dari berbagai proses biologis dan psikologis sehingga menjadikannya suatu proses yang kompleks dimana proses pengamatan dan ingatan adalah dua hal yang terpenting. Penelitian ini akan menerjunkan peneliti kelapangan dalam rangka mengobservasi untuk mengamati objek penelitian sehingga dapat memperoleh informasi terkait kegiatan pelaksanaan pengelolaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur di desa tersebut.

3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi didefinisikan sebagai salah satu metode pengumpulan data yang berisi catatan kejadian penting mengenai topik penelitian yakni catatan dari peristiwa yang telah berlalu atau yang telah terjadi. Dokumentasi dapat bersumber dari buku, artikel jurnal, skripsi maupun dokumen resmi institut. Metode dokumentasi digunakan peneliti untuk memperoleh data tertulis maupun dokumen resmi serta gambar-gambar dengan seluruh pihak yang terlibat dalam penelitian ini.²

E. Pengujian Keabsahan Data

Data yang didapatkan dalam riset kualitatif biasanya bersifat subjektif artinya keakuratan data menjadi hal signifikan dimana perlu pertimbangan untuk menyatakan bahwa temuan penelitian benar-benar nyata sehingga bisa dipercaya dan peneliti mampu mempertanggungjawabkannya. Keabsahan

² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015).240

juga berbicara mengenai seberapa mampu data tersebut menggambarkan fenomena yang diteliti. Menjaga keabsahan data bukanlah hal yang sederhana karena kerap kali menjumpai tantangan seperti keterbatasan waktu dan sumber daya serta subjektivitas peneliti. Peneliti bukan hanya harus memahami konsep keabsahan data tetapi juga harus mampu mengimplementasikan strategi yang relevan secara berkelanjutan dalam rangkaian proses penelitian. Menurut Putri dan Murhayati, salah satu strategi untuk memastikan keabsahan pada riset kualitatif melalui pengujian kredibilitas yang dilakukan dengan penggunaan triangulasi. Triangulasi terbukti efektif dalam meningkatkan validitas dan mengurangi bias data.³

1. Uji Kredibilitas

Kredibilitas adalah ukuran kebenaran data yang telah terkumpul, menunjukkan seberapa dekat konsep peneliti dengan temuan penelitian. Informasi ini adalah dasar penelitian ini. Data harus benar-benar valid karena data adalah segalanya dalam penelitian. Kualitas penelitian kualitatif terletak pada kelengkapan data dari berbagai sumber yang digunakan untuk menguji kredibilitas (derajat kepercayaan) data. Pengujian kredibilitas dapat dilakukan dengan triangulasi, perpanjangan pengamatan dan diskusi dengan teman.⁴ Pengujian kredibilitas penelitian ini akan berfokus pada metode triangulasi.

a. Triangulasi

Triangulasi adalah istilah dalam metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk meningkatkan validitas, akurasi, dan cakupan analisis data. Triangulasi dalam arti luas berarti pemanfaatan berbagai metode untuk analisis dan pengumpulan data untuk memastikan bahwa hasil penelitian lebih kredibel dan lebih dapat diandalkan.

Subjektivitas peneliti dan informan merupakan hal yang lazim dalam penelitian kualitatif. Triangulasi adalah teknik yang bermanfaat untuk memastikan bahwa interpretasi data tidak dilakukan dari satu sudut pandang.

³ Putri Wahidah Luthfiyanti and Sri Murhayati, "Strategi Memastikan Keabsahan Data Dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 3 (2024): 45315–28, <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/21803/15330>.

⁴ Zainal Efendi Hasibuan, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kualitatif, Kuantitatif, Kepustakaan, Dan PTK* (Malang: AE Publishing, 2024).83-84

Alasan di balik hal ini adalah karena penelitian kualitatif tidak selalu didasarkan pada data kuantitatif atau pengukuran yang objektif. Sebaliknya, fenomena sosial yang kompleks, interaksi manusia, dan makna yang dibangun oleh beberapa individu dan kelompok individu adalah area fokus dari penelitian semacam ini. Biasanya, satu teknik atau sumber data tidak akan pernah cukup untuk menggambarkan fenomena tersebut secara rinci.⁵

Ada dua jenis triangulasi yang dapat dilakukan dalam pengecekan data.

1.) Triangulasi sumber

Triangulasi sumber adalah melakukan pemeriksaan data dengan menggunakan beberapa sumber data untuk pengujian kredibilitas. Metode triangulasi ini dilakukan untuk menyangginkan data dari beberapa sumber maupun sudut pandang berbeda. Dengan adanya triangulasi sumber, peneliti dapat memverifikasi keakuratan data, mengurangi kemungkinan bias dan memperkuat validitas hasil penelitian.

2.) Triangulasi teknik

Triangulasi teknik adalah pembuktian informasi menggunakan metoda berbeda untuk pengujian kredibilitas. Metode ini bertujuan untuk memastikan konsistensi data dengan menggunakan berbagai pendekatan dalam pengumpulan data misalnya melalui wawancara dan observasi.⁶

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah tahapan pengorganisasian temuan yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan membagi data-data tersebut kedalam beberapa kriteria, menggambarannya kedalam unit-unit, membuat pola, menentukan data yang krusial untuk dipahami kemudian ditarik kesimpulannya agar dapat dipahami dengan mudah oleh periset dan pembaca. Analisis data pada risetn kualitatif berisi tahapan pelacakan serta

⁵ Bambang Arianto, *Triangulasi Metoda Penelitian Kualitatif* (Balikpapan: Borneo Novelty Publishing, 2024).92

⁶ Juliani and Syahbudin, *Prinsip Dan Aplikasi Metode Penelitian Kualitatif(Kajian Teori Dan Praktik)* (Medan: CV. Merdeka Kreasi, 2025).

pengaturan transkrip wawancara dan observasi secara sistematis untuk diinterpretasikan hasil temuannya kepada orang lain.⁷

Pada tahapan pengelolaan data, peneliti menjabarkan data yang benar-benar ada dan sesuai kenyataan di lapangan secara sistematis dan secara berkelanjutan, yaitu sebelum langsung ke lapangan, saat di lapangan dan setelah di lapangan. Dengan melakukan analisis data, informasi yang diperoleh akan lebih mudah dipahami karena telah melewati proses penyederhanaan data yang awalnya berjumlah sangat besar menjadi laporan gampang dimengerti karena strukturnya yang lebih sederhana.⁸

Miles dan Huberman dalam buku metode penelitiannya menyatakan terdapat tiga langkah wajib dalam merepresentasikan riset kualitatif yakni:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya tidaklah sedikit, untuk itu maka harus dicatat dengan rinci dan teliti. Untuk itu peneliti harus menyelesaikan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti meringkas, memilih hal-hal utama memfokuskan pada hal-hal yang penting menemukan tema dan polanya dan menghilangkan yang tidak perlu. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan peneliti dalam melakukan tahapan analisis data berikutnya.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dilakukan untuk memperjelas pemahaman tentang kasus dan sebagai panduan untuk bertindak berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data. Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikannya. Penyajian data didefinisikan sebagai sekumpulan informasi disusun secara sistematis yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion drawing/Verifying*)

⁷ Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial Dan Pendidikan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006).212

⁸ Herman Warsito, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bina Aksara, 2007).202

Tahap ini adalah menarik kesimpulan dari semua informasi yang diperoleh dari penelitian. Kesimpulan atau verifikasi adalah proses untuk menemukan atau memahami makna, keteraturan, pola, penjelasan, alur sebab-akibat, atau proposisi. Pada tahap ini, peneliti merumuskan argumen logis, mengangkatnya sebagai temuan, dan kemudian meninjaunya secara berulang-ulang. Setelah itu, melaporkan temuan penelitian secara keseluruhan, termasuk temuan yang menyimpang dari temuan sebelumnya, merupakan tahap selanjutnya.⁹

⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002).405-412

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

Deskripsi data adalah tahapan penyajian dan pemaparan data yang berasal dari hasil berlangsungnya penelitian oleh peneliti dimana dimulai dengan observasi di lapangan kemudian dilanjutkan dengan wawancara bersama seluruh informan penelitian. Diselenggarakannya penelitian ini bukan tanpa alasan, melainkan untuk mengetahui seberapa efektifkah pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur di desa Awo'Gading.

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Awo'Gading adalah satu dari beberapa desa di Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan yang berasal dari hasil pemekaran Desa Salujambu. Secara administratif, Kecamatan Lamasi terdiri atas 1 kelurahan dan 9 desa dimana lokasi penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah Desa Awo'Gading.

a. Geografis

1.) Batas Wilayah

Sebelah Timur : Desa Awo'Gading berbatasan dengan Desa Salujambu
Kecamatan Lamasi

Sebelah Barat : Desa Awo'Gading berbatasan dengan Desa To'Pongo
Kecamatan Lamasi

Sebelah Selatan : Desa Awo'Gading berbatasan dengan Desa Setiarejo
Kecamatan Lamasi

Sebelah Utara : Desa Awo'Gading berbatasan dengan Desa Lawewe
Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara

2.) Luas Desa

Luas keseluruhan wilayah Desa Awo'Gading Kecamatan Lamasi adalah seluas 4,2 Km yang terletak di dataran tinggi dengan ketinggian antara 5-50 meter diatas permukaan laut, banyaknya curah hujan rata-rata 48 mm/tahun. Desa Awo'Gading adalah daerah terpencil dalam lingkup Kecamatan Lamasi

yang terdiri dari 4 dusun dan 8 RT. Adapun luas wilayah masing-masing dusun sebagai berikut:

Tabel 4.1 Luas Wilayah Desa Awo Gading

No.	Nama Dusun	Luas Wilayah
1.	Dusun Awo'Gading	115 Ha
2.	Dusun To'Arogo	105 Ha
3.	Dusun Panglawa	85 Ha
4.	Dusun To'Pongo	107 Ha
Jumlah		412 Ha

Sumber Data: Profil Desa

3.) Orbitasi/Jarak dari Pemerintahan Desa

Desa Awo'Gading berjarak 7 Km dari pusat pemerintahan Kecamatan Lamasi. Sedangkan jarak Desa Awo'Gading dengan pusat pemerintahan kabupaten atau ibukota Kabupaten Luwu sejauh 90 Km dan jarak dengan ibukota Provinsi Sulawesi Selatan yakni 382 Km.

b. Demografis

1.) Jumlah Penduduk

Berdasarkan data kependudukan yang bersumber dari profil desa, total penduduk Desa Awo'Gading yang berjenis kelamin Perempuan terbilang dominan dibandingkan dengan laki-laki. Informasi selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Desa Awo Gading

No.	Nama Dusun	Jumlah KK	Jiwa		
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Awo'Gading	134	210	221	431
2.	Arogo	52	94	87	181
3.	Panglawa	95	147	155	302
4.	To'Pongo	111	175	188	363
Jumlah		392	626	651	1.227

Sumber Data: Profil Desa

2.) Jumlah berdasarkan Tingkat Pendidikan Masyarakat

Mayoritas masyarakat Desa Awo'Gading menempuh Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjut Tingkat Pertama. Namun demikian, sudah mulai banyak penduduk desa ini melanjutkan Pendidikan pada Sekolah Lanjut Tingkat Atas hingga ke jenjang universitas. Meningkatnya taraf pendidikan disebabkan kapasitas ekonomi masyarakat yang juga dari tahun ketahun untuk mengakses pendidikan pada tingkat yang lebih baik. Adapun data Tingkat Pendidikan penduduk Desa Awo'Gading Kecamatan Lamasi dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 4.3 Daftar Tingkat Pendidikan Masyarakat

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Jiwa
1.	Taman Kanak-kanak	30
2.	Sekolah Dasar/ sederajat	42
3.	SLTP/ Sederajat	35
4.	SMA/ Sederajat	20
5.	Akademi/ D1-D3	15
6.	Sarjana	30

Sumber; Profil Desa

3.) Jumlah Penduduk berdasarkan Pekerjaan/Mata Pencaharian

Masyarakat Awo'Gading umumnya berpenghasilan dengan bertani dan menjadi buruh, ada juga yang bermata pencaharian sebagai pegawai dan berdagang. Adapun data penduduk Desa Awo'Gading berdasarkan pekerjaan yakni:

Tabel 4.4 Jumlah Penduduk berdasarkan Pekerjaan

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah Jiwa
------------	------------------------	--------------------

1.	Pegawai Negeri Sipil	7
2.	TNI/Polri	2
3.	Karyawan Swasta	3
4.	Buruh Harian Lepas	31
5.	Pedagang	17
6.	Petani	250
7.	Tukang	9
8.	Buruh Tani	25
9.	Mengurus Rumah Tangga	194
10.	Pelajar	172
11.	Sopir	6
12.	Tukang Batu	3
13.	Penjahit	3
14.	Guru	5
15.	Bidan	4
16.	Honoror	12
17.	Perawat	5
18.	Perangkat Desa	9
19.	Lainnya	37

Sumber:Profil Desa

2. Visi dan Misi Desa Awo’Gading

a.) Visi:

“MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH,
TRANSPARAN DAN AKUNTABEL SERTA MEWUJUDKAN DESA

AWO GADING MENJADI DESA YANG UNGGUL DAN MANDIRI DI BIDANG PERTANIAN GUNA MEMENUHI KEBUTUHAN DASAR MASYARAKAT”.

Religius dalam artian kondisi masyarakat Desa Awo Gading yang agamis, saling menghormati dan saling toleransi berdasarkan pada ajaran agama yang dianut oleh para pemeluknya.

Lebih Maju, yakin keberhasilan pembangunan desa lebih baik dari sebelumnya dengan indikasi utama pada pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita sehingga angka harapan hidup masyarakat dari berbagai indikator sosial, ekonomi dan politik diharapkan dapat menyamai atau lebih baik dari laju pertumbuhan dan perkembangan daerah lain.

Unggul dimaksudkan bahwa Desa Awo’Gading bisa memperlihatkan kelebihan dari pembangunan yang telah terealisasi dengan tekad yang bulat pembangunan diupayakan hari ini lebih baik dari kemarin, dan hari esok lebih unggul dan berkesinambunagn dari hari ini.

Berkeadilan, yakin berorientasi pada pemerataan, bersifat adil dan memfasilitasi terwujudnya rasa keadilan bagi masyarakat sebagai dampak dari pelayanan publik pemerintah desa yang semakin baik dan efisien, dengan demikian memungkinkan masyarakat memperoleh kesempatan yang sama agar dapat tumbuh dan berkembang.

b.) Misi

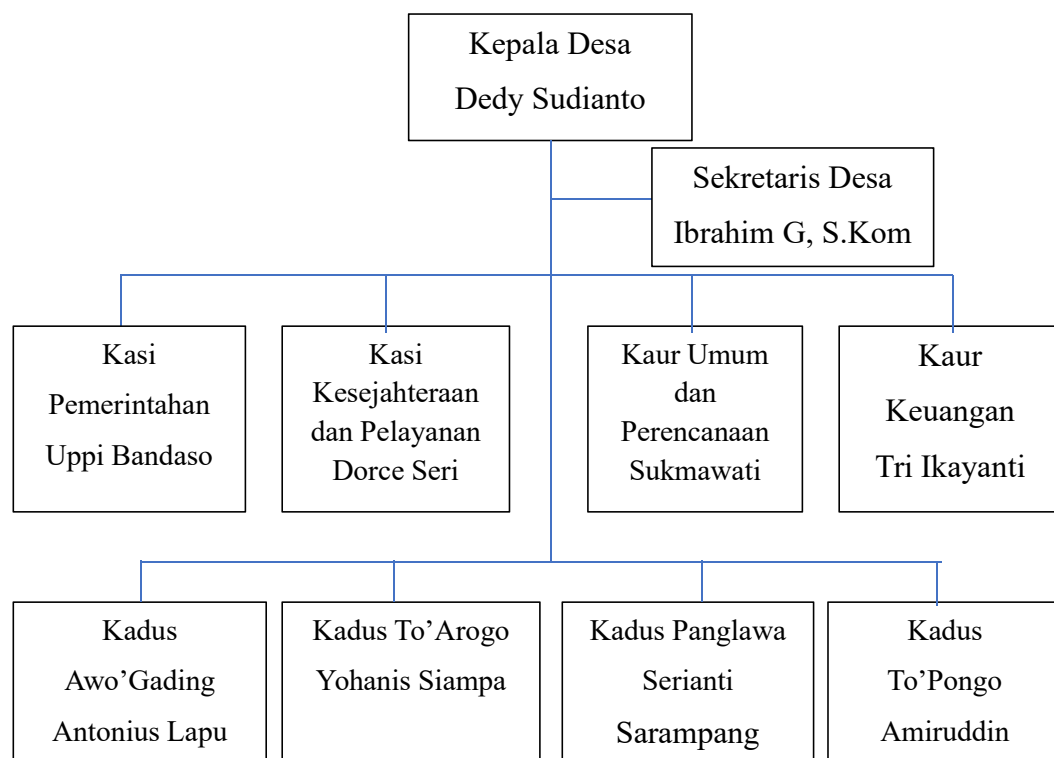
Misi adalah sebuah komitmen yang diupayakan untuk dicapai melalui prioritas dan pokok-pokok program serta kegiatan, antara lain:h

- 1.) Menciptakan suasana yang kondusif untuk mewujudkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga tercipta kerukunan antara umat beragama tanpa perbedaan suku, agama, ras dan golongan.
- 2.) Meningkatkan perencanaan dan proses pembangunan yang asfifatif, responsif, inovatif dan terpadu melalui pembangunan masyarakat secara berkelanjutan dan partisipatif, dengan pola mengikutsertakan secara aktif peran masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

- 3.) Meningkatkan pemerintahan yang baik dan bersih dengan tata kelola yang amanah yang berbasis pada prestasi kerja dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
- 4.) Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa diantaranya: pembangunan pasar desa, jalan, jembatan dan sebagainya.
- 5.) Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat yang efisien
- 6.) Meningkatkan kualitas SDM yang unggul dan berkeadilan.
- 7.) Mendorong terwujudnya ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada sektor Perkebunan dan pertanian.

3. Struktur Organisasi Desa Awo Gading

Bagan 4.1 Struktur Organisasi Desa Awo'Gading



Sumber: Data diperoleh dari Kantor Desa Awo'Gading

4. Deskripsi Informan

Penelitian dilakukan melalui wawancara langsung bersama delapan narasumber di lapangan selama kurang dari satu bulan dimana informan-informan tersebut terbagi menjadi dua golongan yaitu aparat Desa Awo'Gading dan masyarakat lokal Desa Awo'Gading yang berjumlah

sebanyak delapan(8) orang. Penjabaran narasumber pada penelitian ini meliputi status pekerjaan, jenis kelamin usia, usia dan tingkat pendidikan. Adapun ringkasan data responden dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

Tabel 4.5 Daftar Nama Informan Penelitian

No.	Informan	Alamat	Pekerjaan	Tanggal Wawancara
1.	Dedi Sudianto	Awo'Gading	Kepala Desa	17 September 2025
2.	Ibrahim G.	Awo'Gading	Sekretaris Desa	23 September 2025
3.	Dorce Seri	Awo'Gading	Kasi Kesejahteraan	17 September 2025
4.	Tri Ikayanti	Awo'Gading	Kaur Keuangan	17 September 2025
5.	Risal	Awo'Gading	Petani	7 September 2025
6.	Hasnawati	Awo'Gading	Ibu Rumah Tangga	14 September 2025
7.	Israng	Awo'Gading	Petani	14 September 2025
8.	Heri	Awo'Gading	Petani	7 September 2025

Sumber: Data diolah, 2025

Dedy Sudyanto merupakan kepala desa yang sudah menjabat selama 7 tahun. Beliau terpilih dalam pemilihan kepala desa mengungguli kandidat lainnya pada Desember 2017. Kepala desa dalam pembangunan berperan sebagai kepala pengelola. Jabatannya sebagai pengelola pembangunan membuat peneliti mengangkat Pak Dedy sebagai narasumber utama. Ibrahim G. menjabat sekretaris desa mulai pada tahun 2023, sebelumnya menjabat sebagai kaur umum dan perencanaan ditahun 2018. Sekdes memerankan peran yang cukup penting pada pengelolaan dana desa yakni membuat rencana kerja jangka panjang (RKP). Dorce seri selaku kaur pembangunan telah menjabat lebih dari 15 tahun di pemerintahan. Beliau sudah sangat berpengalaman dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola pembangunan. Tri Ikayanti menjabat sebagai bendahara desa namun biasa juga disebut dengan kaur keuangan, jabatannya dimulai pada tahun

2024. Tri Ikayanti bertugas membuat laporan pertanggungjawaban dana desa yang diserahkan kepada pemerintah kabupaten. Keempat aparat desa ini berperan penting pada setiap tahapan pembangunan yang diselenggarakan secara padat karya.

Risal merupakan warga desa Awo'Gading yang berprofesi sebagai petani naum sangat aktif pada setiap kegiatan program pembangunan fisik yang diselenggarakan pemerintah. Hasnawati adalah seorang ibu rumah tangga yang dulunya adalah seorang guru honorer di salah satu sekolah swasta. Beliau sangat aktif pada kegiatan PKK sehingga diangkat menjadi salah satu narasumber. Israng merupakan salah satu tokoh masyarakat yang tentunya dikenal oleh banyak masyarakat desa. Heri adalah salah satu anggota karang taruna desa yang aktif pada kegiatan pemerintahan sehingga diangkat pula menjadi narasumber. 8 narasumber yang dipilih tentunya telah memenuhi kriteria penelitian yakni mengetahui pokok permasalahan penelitian yakni terkait pengelolaan dana desa dalam pembangunan.

Tabel 4.6 Informan berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	Presentase(%)
1.	Laki-Laki	5	62,5
2.	Perempuan	3	37,5
Total		8	100

Sumber: Data diolah, 2025

Tabel tersebut menunjukkan mayoritas narasumber yang ikut berperan pada riset ini yaitu berjenis kelamin laki-laki dengan total lima(5) orang dengan presentase sebesar 62,5% dan sisanya berjumlah tiga(3) orang narasumber perempuan dengan presentase sebesar 37,5%.

Tabel 4.7 Informan berdasarkan Tingkat Usia

No.	Tingkat Usia(Tahun)	Jumlah(Orang)	Presentase(%)
1.	25-30	1	12,5
2.	31-40	2	25
3.	41-50	3	37,5
4.	51-60	2	25
Total		8	100

Sumber: Data diolah,2025

Tabel diatas memperlihatkan narasumber berusia 51-60 tahun berjumlah dua(2) orang atau 25%, dilanjutkan dengan rentang usia 41-50 tahun sebanyak tiga(3) atau 37,5%, kemudian narasumber berusia 31-40 berjumlah dua(2) atau 25% sedangkan sisanya usia 25-30 berjumlah satu(1) orang atau sebesar 12,5%.

Tabel 4.8 Informan berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah(Orang)	Presentase(%)
1.	SMP	2	25
2.	SMA	3	37,5
3.	S1	3	37,5
	Total	8	100

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan tingkat pendidikan, minoritas narasumber berpartisipasi pada riset ini yaitu narasumber yang berendidikan SMP yakni berjumlah dua(2) orang dengan presentase sebesar 25%, kemudian narasumber tingkat pendidikan SMA sebanyak tiga(3) orang atau sebesar 37,5% dan sisanya sebanyak tiga(3) orang dengan tingkat pendidikan S1 dengan presentase sebesar 37,5%.

B. Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Berdasarkan kerangka pikir pada bab sebelumnya dipaparkan bahwa untuk mendapatkan hasil penelitian yaitu untuk mempelajari bagaimana efektivitas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur di Desa Awo'Gading, peneliti menggunakan indikator yang berlandaskan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa sebagai teori utama dalam menjawab rumusan masalah yang ada yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan/pertanggungjawaban dalam menilai efektivitasnya.

Adapun temuan yang peneliti dapatkan di lapangan berupa informasi yang relevan mengenai efektivitas pengelolaan dana desa.

a. Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrsaturuktur

1.) Reduksi Data

Pembangunan desa pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup warga setempat. Pemerintah daerah berkewajiban memastikan agar proses ini berjalan dengan adil, sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh semua anggota masyarakat. Dengan cara itu, kita bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang cukup besar dan membangun suasana lingkungan yang sehat, penuh energi, aman, serta stabil. Dalam upaya mencapai sasaran penyelenggaraan negara secara keseluruhan, pemerintah daerah berperan sebagai garda terdepan dalam pemerintahan, yang bertugas menjaga agar kesejahteraan tersebar merata di antara seluruh penduduk.

Pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur di desa Awo'Gading adalah proses pengorganisasian, pengaturan, pengelolaan dan pengendalian dana desa untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur desa, mulai dari tahapan perencanaan hingga pengawasan atau evaluasi. Kegiatan tersebut diadakan untuk memastikan kesejahteraan masyarakat dapat tumbuh dan berkembang secara merata sesuai pelaksanaan program pemerintah desa berdasarkan aturan yang berlaku.

2.) Penyajian Data

a.) Perencanaan

Tahap perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Awo Gading dapat dikatakan sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yakni terdapatnya musyawarah yang diadakan pemerintah desa untuk membahas perencanaan pembangunan desa yang menandakan bahwa perencanaan anggaran dilakukan secara transparan. Perencanaan dilakukan melalui musyawarah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan desa dan seluruh masyarakat untuk memberikan partisipasi mengenai penyusunan dan penentuan rencana program pembangunan desa. Musyawarah yang diselenggarakan pemerintah desa ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengeluarkan aspirasi mengenai kebutuhan ataupun keperluan yang mendesak untuk dapat menunjang aktivitas sehari-hari mereka. Dimana setiap peserta berkesempatan untuk memberikan pendapatnya kemudian semua usulan-usulan tersebut ditelaah bersama untuk menetapkan program yang paling bermanfaat

dan yang paling mendesak. Hasil dari kegiatan musyawarah yang diadakan oleh aparat desa ini nantinya akan menjadi landasan utama dalam penetapan prioritas program pembangunan dalam artian bahwasanya setiap program pembangunan merupakan hasil dari musyawarah bersama. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Dedi Sudianto selaku Kepala Desa Awo gading:

“Jadi begini, untuk musyawarah itu memang ada tahapannya. Pertama, kami mengundang anggota BPD dan perwakilan masyarakat untuk menghadiri musyawarah mengenai rencana pengalokasian anggaran yang diadakan di kantor desa. tujuannya itu untuk mendegarkan aspirasi masyarakat mengenai apa yang menjadi kebutuhan mereka. Setiap dusun memiliki usulan tersendiri dan semua usulan-usulan tersebut akan dibahas bersama-sama untuk menentukan kebutuhan mana yang paling mendesak dan yang paling bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Kemudian hasil dari musyawarah tersebut menjadi dasar bagi kami untuk menentukan prioritas pembangunan. Jadi, setiap pembangunan yang diadakan adalah hasil dari kesepakatan bersama. Musyawarah itu juga ada tiga tahapan, pertama musyawarah desa untuk pembentukan tim RKPDS, kemudian musyawarah desa membahas rancangan usulan program pembangunan dan yang terakhir musyawarah penetapan usulan.”¹

Kalimat “...kami mengundang anggota BPD dan perwakilan masyarakat untuk menghadiri musyawarah mengenai rencana pengalokasian anggaran..” menjadi bukti bahwa pada tahapan perencanaan dimana salah satu tolak ukurnya adalah musyawarah telah terpenuhi karena sudah dijalankan oleh aparat desa selaku pelaksana program. Diadakannya musyawarah tersebut mengonfirmasi bahwa perencanaan pembangunan bersifat transparan terhadap seluruh masyarakat desa.

Hal ini juga dikonfirmasi oleh Pak Risal, warga desa Awo’Gading yang menjadi salah satu informan penelitian yang diwawancarai mengenai musyawarah desa menuturkan bahwa:

“Iya pernah. Biasanya kita diundang ke kantor desa untuk menghadiri musyawarah untuk membahas mengenai perencanaan pembangunan kadang juga membahas program-program lain yang sekiranya butuh masukan dari masyarakat.”²

¹ Dedy Sudianto, “Tahapan Perencanaan Pembangunan” (Awo’Gading: Wawancara, 2025).

² Risal, “Tahapan Perencanaan Pembangunan” (Awo’Gading: Wawancara, 2025).

Tanggapan dari masyarakat berupa “... *kita diundang ke kantor desa untuk menghadiri musyawarah...*” memvalidasi pernyataan kepala desa yang menyatakan telah mengadakan musyawarah untuk membahas perencanaan pembangunan. Adanya respon positif dari masyarakat ini membuktikan bahwa musyawarah tersebut benar-benar dilakukan dengan mengikutsertakan warga desa.

Keterlibatan masyarakat dalam musyawarah juga dikonfirmasi oleh Ibu Hasnawati, yang menyatakan bahwa ia selalu diundang untuk menghadiri musyawarah di kantor desa namun tidak pernah menghadiri musyawarah:

“Ya pastinya selalu dapat undangan untuk menghadiri musyawarah desa yang disampaikan langsung oleh staf desa, tapi saya pribadi tidak pernah menghadiri musyawarah karena sibuk”³

Selanjutnya pernyataan serupa juga diberikan oleh masyarakat lain yang menjadi informan. Dalam kutipan pernyataannya “...*selalu dapat undangan untuk menghadiri musyawarah...*”, narasumber juga mengaku bahwa ia mendapat undangan dari pemerintah desa untuk menghadiri musyawarah. Namun undangan tersebut tidak diindahkan dengan kata lain narasumber tidak menghadiri rapat. Hal serupa juga disampaikan oleh Pak Israng yang mengaku tidak pernah menghadiri musyawarah desa meskipun mendapat undangan:

“Kalau undangan memang ada, tapi saya pribadi tidak ada waktu untuk menghadiri rapat-rapat seperti itu. Apalagi sehari-harinya saya sibuk ke kebun dan mengurus bengkel jadinya tidak sempat.”⁴

Pengakuan yang disampaikan oleh Pak Israng yang menyatakan bahwa “...*saya tidak ada waktu untuk menghadiri rapat...*” hampir sama dengan narasumber sebelumnya yang tidak mengindahkan undangan. Kemudian pendapat yang juga tidak jauh berbeda yaitu pernyataan dari Pak Heri, salah satu warga Desa Awo’Gading yang menjadi narasumber penelitian yang menuturkan bahwasnya ia tidak pernah menghadiri musyawarah di kantor desa:

“Saya pribadi tidak pernah ikut musyawarah juga tidak pernah mendapat undangan. Setau saya yang ikut musyawarah seperti itu hanya tokoh masyarakat saja jadi saya juga kurang tau masalah itu.”⁵

³ Hasnawati, “Tahapan Perencanaan Pembangunan” (Awo’Gading: Wawancara, 2025).

⁴ Israng, “Tahapan Perencanaan Pembangunan” (Awo’Gading: Wawancara, 2025).

⁵ Heri, “Tahapan Perencanaan Pembangunan” (Awo’Gading: Wawancara, 2025).

Ketiga pengakuan narasumber diatas mengkonfirmasi bahwa benar adanya musyawarah telah dilakukan pemerintah. Disisi lain, tanggapan ketiga narasumber ini sekaligus menyatakan bahwa mereka tidak menghadiri musyawarah. Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti dapat memastikan pemerintah berkomitmen pada aspek transparansi penggunaan dana desa dengan diadakannya musyawarah desa dalam membahas rencana program pembangunan. Namun kehadiran masyarakat dalam agenda musyawarah sangat minim sehingga dalam aspek partisipasi masyarakat belum efektif. Dengan demikian tahapan perencanaan pembangun dapat dikatakan belum berjalan dengan baik meskipun pemerintah desa telah mengadakan musyawarah, namun partisipasi masyarakat sangat kurang sehingga usulan yang diberikan oleh sebagian kecil masyarakat belum bisa mewakili seluruh kebutuhan masyarakat desa. Disisi lain, penetapan proyek pembangunan adalah tetap berasal dari kesepakatan bersama antara pihak aparat desa dan masyarakat yang diperoleh dari hasil musyawarah desa. Maka dari itu, pada tahapan perencanaan ini indikator musyawarah sudah terpenuhi namun indikator partisipasi masyarakat tidak.

b.)Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan yaitu bagaimana pemerintah desa merealisasikan perencanaan pada tahap sebelumnya. UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah desa harus melibatkan masyarakat dan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa. Keterlibatan masyarakat masyarakat tidak kalah pentingnya dalam pelaksanaan pembangunan. Sebagai bentuk kebijakan pemerintah desa, aparat desa memberdayakan masyarakat lokal sebagai tenaga kerja dalam pelaksanaan proyek, sehingga memungkinkan pula dapat menjadi sumber pendapatan bagi warga desa yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan pembangunan. Sebagaimana yang disampaikan oleh sekretaris desa yakni Pak Ibrahim pada saat wawancara:

“Ya, tentu saja masyarakat selalu dilibatkan bukan hanya pada saat tahap perencanaan tapi juga dalam pelaksanaan pembangunan. Jadi kalau ada proyek pastinya kita rekrut pekerja dari masyarakat lokal, bukan dari luar, hal ini dilakukan untuk memberdayakan potensi lokal desa, serta bisa menjadi

sumber pendapatan bagi warga desa. kami juga selalu melibatkan anggota BPD dalam setiap tahapan pembangunan.”⁶

Pernyataan yang dituturkan oleh sekdes Awo’Gading yakni “...masyarakat selalu dilibatkan...” mengindikasikan bahwa pelaksanaan pembangunan telah melibatkan masyarakat untuk mengambil peran sebagai pekerja. Hal ini sesuai dengan salah satu indikator tahapan pelaksanaan yaitu pemanfaatan potensi lokal dalam pembangunan.

Tanggapan ini sejalan dengan pernyataan masyarakat yang mengaku dilibatkan langsung oleh pemerintah desa sebagai tenaga kerja dalam proyek pembangunan. Secara umum, penilaian warga terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah sangat positif dikarenakan pekerja proyek bukan berasal dari luar, melainkan dari warga sekitar. Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada Pak Risal:

“Iya. Saya pernah terlibat langsung dalam pelaksanaan pembangunan bersama beberapa teman saya sebagai pekerja harian, lumayan buat tambahan penghasilan.”⁷

Tanggapan narasumber diatas yang mengatakan “... saya pernah terlibat dalam pembangunan...” menjadi salah satu respon positif dari masyarakat. pernyataan ini sekaligus mengkonfirmasi bahwa pemerintah memang mengikutsertakan masyarakat. Hal ini juga dikonfirmasi oleh informan lain yakni Pak Heri yang menyatakan juga pernah terlibat langsung dalam pelaksanaan proyek pembangunan desa.

“Pernah, baru-baru ini saya dan rekan-rekan saya ikut langsung pada proyek renovasi kantor desa. pastinya kita dapat penghasilan dari situ, jadinya bisa digunakan untuk membeli keperluan sehari-hari.”⁸

Kalimat “...saya dan rekan-rekan saya ikut langsung pada proyek...” lagi-lagi menjadi bukti kuat yang memvalidasi pernyataan dari aparat desa. maka dari itu indikator pemanfaatan potensi lokal telah terpenuhi.

Pemanfaatan potensi lokal bukan satu-satunya menjadi tolak ukur dalam menentukan efektivitas pelaksanaan pembangunan, yang tak kalah penting adalah

⁶ Ibrahim G, “Tahapan Pelaksanaan Pembangunan” (Awo’Gading: Wawancara, 2025).

⁷ Risal, “Tahapan Pelaksanaan Pembangunan” (Awo’Gading: Wawancara, 2025).

⁸ Heri, “Tahapan Pelaksanaan Pembangunan” (Awo’Gading: Wawancara, 2025).

apakah program tersebut dapat tepat sasaran atau dengan kata lain pembangunan yang direalisasikan benar-benar merupakan sebuah prioritas yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat desa keseluruhan serta apakah program pembangunan tersebut dapat diselesaikan tepat waktu.

Pemerintah desa dalam menentukan prioritas pembangunan memiliki beberapa pertimbangan yakni proyek yang memiliki manfaat bagi banyak orang dan tingkat urgensi yang tinggi. Hal ini didasarkan pada usulan masyarakat sewaktu dilaksanakannya musyawarah desa. sebagaimana disampaikan oleh Kepala Desa Awo Gading, Pak Dedi Sudyanto dalam wawancara:

“Mengenai prioritas, pastinya kami memiliki banyak pertimbangan. Yang pertama itu adalah bisa bermanfaat untuk banyak orang. Kedua, adalah melihat tingkat urgensinya. Bukan hanya itu, usulan mengenai pembangunan yang bisa mendukung sektor ekonomi lokal seperti pembangunan irigasi juga menjadi pertimbangan kami agar setiap pembangunan dapat benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga bisa menunjang kehidupan sehari-hari.”⁹

Kepala desa menuturkan bahwa *“...setiap pembangunan dapat benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat...”* mengartikan bahwa pemerintah berupaya agar program yang dijalankan tepat sasaran dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Peneliti kemudian mewawancarai masyarakat lokal pribadi Pak Israng mengenai ketepatan sasaran program pembangunan. Ia mengakui bahwa pembangunan yang diprogramkan bermanfaat bagi masyarakat. Berikut pernyataannya:

“Menurut saya pribadi, tentu saja sangat bermanfaat. Sebagai seorang petani saya bersyukur saluran irigasi sudah mumpuni, jadi tidak perlu lagi menggunakan mesin pemompa air dari sungai untuk mengairi area persawahan saya.”¹⁰

Dari kutipan diatas dapat digaris bawahi *“...menurut saya sangat bermanfaat...”* menandakan program pembangunan yang dilaksanakan sudah tepat sasaran karena memiliki manfaat yang signifikan terhadap masyarakat. Pernyataan serupa juga dikemukakan oleh Ibu Hasnawati, salah satu warga desa

⁹ Dedi Sudyanto, “Tahapan Pelaksanaan Pembangunna” (Awo’Gading: Wawancara, 2025).

¹⁰ Israng, “Tahapan Pelaksanaan Pembangunan” (Awo’Gading: Wawancara, 2025).

Awo Gading yang menjadi narasumber penelitian yang menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur sangat membantu masyarakat desa.

“Iya bermanfaat, saluran irigasi disepanjang tepi jalan berfungsi dengan baik. Jadi sudah jarang halaman rumah saya tergenang air saat musim hujan.”¹¹

Pernyataan narasumber diatas sejalan dengan pernyataan sebelumnya yakni *“...irigasi berfungsi dengan baik...”* mengisyaratkan pembangunan telah memenuhi indikator ketepatan sasaran.

Mengenai ketepatan waktu, pemerintah desa mengklaim bahwa setiap proyek pembangunan selalu dapat diselesaikan tepat waktu bahkan kerap kali lebih cepat dari estimasi. Contohnya, proyek yang masa kerjanya 90 hari dapat selesai hanya dalam satu bulan. Hal ini dikarenakan kesiapan bahan material dan tenaga kerja yang memadai. Sebagaimana wawancara yang dilakukan peneliti terhadap Kasi Pembangunan desa Awo Gading, Ibu Dorce Seri:

“Semua pembangunan pastinya selesai tepat waktu bahkan tidak jarang lebih cepat dari estimasi. Biasanya setiap proyek itu masa kerjanya 90 hari kerja, tetapi bisa terselesaikan hanya dalam satu bulan. Hal ini dikarenakan pembangunan direncanakan secara matang, kita memerhatikan pasokan material dan juga tenaga kerja agar tidak melewati tenggat pengerjaan.”¹²

Kasi pembangunan mengklaim pembangunan selalu tepat waktu, seperti dalam pernyataannya *“...semua pembangunan pastinya selesai tepat waktu bahkan lebih cepat dari estimasi...”*. Pernyataan ini dikonfirmasi pula oleh masyarakat yang diwawancarai yakni Pak Risal yang mengatakan bahwa:

“Sepengetahuan saya selalu tepat waktu. Kalaupun molor pasti ada alasan yang bisa dimaklumi, tapi belum pernah ada kabar tentang keterlambatan pengerjaan proyek pembangunan. Itu berarti pembangunan selalu berjalan sesuai tenggat”¹³

Pendapat tersebut tidak jauh berbeda dari pernyataan dari hasil wawancara terhadap Pak Heri yang menyatakan bahwa proyek pembangunan tidak pernah mengalami keterlambatan dalam pengerjaannya, berikut pernyataannya:

“Setiap proyek selalu terealisasi tepat waktu. Kadang juga selesai sebelum tenggat waktunya. Ya mungkin karena bahan material dan tenaga kerjanya

¹¹ Hasnawati, “Tahapan Pelaksanaan Pembangunan” (Awo’Gading: Wawancara, 2025).

¹² Dorce Seri, “Tahapan Pelaksanaan Pembangunan” (Awo’Gading: Wawancara, 2025).

¹³ Risal, “Tahapan Pelaksanaan Pembangunan.”

sudah diperhitungkan dengan matang makanya tidak pernah lewat dari estimasi.”¹⁴

Penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya proyek pembangunan desa Awo Gading menunjukkan sinergitas antara semua pemangku kepentingan, hal ini terlihat dari setiap tahapan pembangunan yang selalu melibatkan masyarakat sehingga setiap proyek selalu berfokus terhadap prioritas yang tepat sasaran yang memungkinkan tercapainya keberhasilan dalam mewujudkan pembangunan yang berdampak positif bagi seluruh masyarakat. Secara keseluruhan, tahapan pelaksanaan dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik.

c.) Pengawasan

Menurut Pasal 82 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, warga desa diberi hak untuk mengawasi langsung bagaimana pembangunan desa dilaksanakan. Selain itu, mereka bisa menyampaikan laporan dari hasil pengawasan tersebut dan mengajukan berbagai keluhan yang terkait dengan proses pembangunan desa kepada pemerintah desa. Hasil wawancara yang dilakukan berbanding lurus dengan ketentuan tersebut. Dalam tahapan pengawasan pembangunan, akuntabilitas penyelenggara dan evaluasi kegiatan merupakan hal yang perlu diperhatikan. Sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara, aparat desa membuat laporan pertanggungjawaban yang diserahkan kepada pemerintah daerah. Pengawasan adalah hal yang wajib dilakukan pada setiap tahap akhir dari program. Sebagaimana dikatakan langsung oleh Pak Dedi Sudianto:

“Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa itu kita serahkan kepada pemerintah daerah(kabupaten), tidak ada laporan khusus yang dibuat untuk ditujukan kepada masyarakat namun warga juga bisa melihat laporan tersebut. setiap proyek pembangunan juga terdapat baliho atau papan informasi yang berisi besaran anggaran dan program pembangunan yang bisa dilihat langsung oleh seluruh masyarakat. Jadi dari situ, warga bisa melihat penggunaan dana desa. selain itu, anggota BPD juga selalu mengawasi seluruh rangkaian tahapan pembangunan. Mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan hingga tahap akhir yaitu pengawasan.”¹⁵

¹⁴ Heri, “Tahapan Pelaksanaan Pembangunan.”

¹⁵ Dedi Sudianto, “Tahapan Pelaksanaan Pembangunan” (Awo’Gading: Wawancara, 2025).

Kutipan yang berisi “...setiap proyek pembangunan terdapat atau papan informasi yang berisi besaran anggaran...” merupakan petunjuk bahwa proses pengawasan telah berjalan sebagaimana mestinya. Pendapat serupa juga dikeluarkan oleh sekretaris desa Awo’Gading yakni Pak Ibrahim yang menuturkan bahwa:

“Sebagai aparat desa, sudah semestinya kami berusaha menyampaikan rencana penggunaan dana desa semaksimal mungkin. Salah satu upaya yang kami lakukan adalah memasang papan informasi mengenai alokasi dana desa berukuran besar di depan kantor desa yang bisa dilihat oleh seluruh masyarakat. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi karena dalam baliho tersebut dipaparkan secara rinci berapa dana yang masuk dan dicantumkan pula program-program yang terealisasi serta besaran anggarannya.”¹⁶

Kalimat “...tidak ada yang ditutup-tutupi karena dalam baliho tersebut dipaparkan secara rinci...” mengindikasikan bahwa satu dari indikator dari tahapan pengawasan yakni akuntabilitas penyelenggara telah terpenuhi. Hal ini sejalan dengan pernyataan Ibu Hasnawati, warga lokal yang menjadi salah satu narasumber penelitian yang menuturkan bahwa laporan penggunaan dana hanya berupa papan informasi yang dapat dilihat oleh siapapun.

“Kalau masalah laporan itu saya belum pernah lihat. tidak ada yang kasi tahu juga. Sepertinya memang tidak ada laporan yang dibuat untuk masyarakat. Tapi ada papan informasi yang memuat informasi terkait dana desa, isinya cukup jelas karena dipajang langsung didepan kantor desa, kalau setiap ada proyek juga itu ada baliho yang dipasang, isinya besaran dana yang dikeluarkan untuk proyek itu”¹⁷

Pengakuan dari aparat desa dikonfirmasi langsung oleh masyarakat desa yang menyatakan bahwa memang benar terdapat papan informasi terkait penggunaan dana desa, yakni pada kutipan “...setiap ada proyek itu ada baliho yang dipasang isinya besaran dana yang dikeluarkan untuk proyek itu”. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui indikator akuntabilitas penyelenggara dalam tahapan pengawasan ini sudah terpenuhi.

Selanjutnya indikator kedua dari tahapan pengawasan adalah evaluasi kegiatan. Menurut pendapat warga, evaluasi kegiatan dilakukan secara informal dengan memberikan kesempatan bagi warga jika ingin mengajukan keluhan. Berikut kutipan dari Bu Tri Ikayanti selaku bendahara desa.

¹⁶ Ibrahim G, “Tahapan Perencanaan Pembangunan” (Awo’Gading: Wawancara, 2025).

¹⁷ Hasnawati, “Tahapan Pengawasan Pembangunan” (Awo’Gading: Wawancara, 2025).

“Kalau untuk evaluasi sendiri itu tidak dilakukan secara formal, tetapi biasanya masyarakat menyampaikan secara langsung jika terdapat hal yang perlu dievaluasi. Tanggapan-tanggapan dari masyarakat ini nantinya akan menjadi pertimbangan bagi pelaksanaan program berikutnya.”¹⁸

Kutipan diatas yang berisi “...masyarakat menyampaikan secara langsung jika terdapat hal yang perlu dievaluasi...” berarti pada tahapan evaluasi ini indikator keduanya sudah terlaksana. Indikator yang dimaksud adalah evaluasi kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat meskipun evaluasi dilakukan dengan sederhana. Pendapat ini diperkuat dengan pernyataan Pak Israng yang mengklaim bahwa masyarakat memiliki wadah untuk memberikan usulan kepada pihak pemerintah desa secara langsung maupun pada saat pelaksanaan musyawarah. Masyarakat menilai aparat desa bersifat lunak terhadap komentar yang disampaikan oleh setiap warga serta selalu menanggapi usulan yang masuk akal dari masyarakat.

“Iya ada, kami juga lumayan akrab dengan pak sekdes jadi bisa langsung disampaikan keluh kesahnya. Kalau usulannya bagus dan masuk akal pasti langsung ditanggapi juga.”¹⁹

Tanggapan diatas menguatkan respon dari narasumber sebelumnya. Berdasarkan kutipan “...bisa disampaikan langsung keluh kesahnya...” memiliki arti bahwa memang benar pemerintah tidak tertutup oleh tanggapan dari warganya. Berdasarkan penjelasan diatas peneliti menilai tahapan pengawasan telah berlangsung secara efektif. Ini terjadi karena kedua indikator pada tahapan pengawasan ini telah terpenuhi yakni akuntabilitas penyelenggara dan evaluasi kegiatan dibuktikan oleh hasil wawancara dari para informan. Partisipasi masyarakat dalam memberikan evaluasi pada proyek pembangunan desa merefleksikan komitmen aparat desa dalam meenerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

b. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur

1.) Reduksi Data

¹⁸ Tri Ikayanti, “Tahapan Pengawasan Pembangunan” (Awo’Gading: Wawancara, 2025).

¹⁹ Israng, “Tahapan Pengawasan Pembangunan” (Awo’Gading: Wawancara, 2025).

Efektivitas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa pastinya dipengaruhi oleh banyak faktor. Dalam setiap tahapan pembangunan bisa mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Adapun hambatan atau kendala pemerintah Desa Awo'Gading dalam manajemen keuangan desa terkait pembangunan adalah pada tahapan perencanaan.

2.) Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dilapangan, tahapan perencanaan pembangunan di Desa Awo Gading ternyata belum berjalan dengan mulus. Hal ini disebabkan ada sebuah faktor penghambat yang dijumpai dalam proses perencana program yaitu partisipasi masyarakat. Dalam tahapan perencanaan, kegiatan awal yang dilakukan pemerintah desa adalah mengadakan musyawarah untuk menentukan prioritas pembangunan, namun masyarakat yang datang hanya itu-itu saja sehingga masukan yang disampaikan kepada aparat desa selaku pelaksana pembangunan kurang bervariasi sehingga memungkinkan usulan yang tersampaikan belum dapat mewakili kebutuhan seluruh masyarakat. sebagaimana yang disampaikan oleh Kasi Pembangunan, Ibu Dorce Seri dalam wawancara:

“kendalanya itu dari kurangnya pasrtisipasi masyarakat. musyawarah sudah kami adakan tapi terkadang warga yang datang itu-itu saja. Jadi usulan yang tersampaikan kurang bervariasi sehingga belum tentu bisa mewakili seluruh kebutuhan masyarakat. Padahalkan harapan kita bersama bisa mengetahui apa yang sangat mendesak bagi warga.”²⁰

Kutipan diatas *“kendalanya itu dari kurangnya partisipasi masyarakat...”* mengindikasikan bahwasanya masyarakat masih kurang peduli terhadap undangan dari pemerintah yang mengintruksikan untuk datang langsung pada kegiatan musyawarah. Dari hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor yang menghambat efektivitasnya pengelolaan dana desa dalam pembangunan di Desa Awo'Gading adalah kurangnya pasrtisipasi masyarakat.

2. Pembahasan Hasil Penelitian/Penarikan Kesimpulan

²⁰ Dorce Seri, “Faktor-Faktor Perencanaan Pembangunan” (Awo'Gading: Wawancara, 2025).

a. Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur

Efektivitas secara bahasa berasal dari kata efektif yang memiliki makna ada efeknya, akibatnya dan keadaan berpengaruh sehingga kesannya dapat berhasil dan berguna.²¹ Berdasarkan UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa, keberhasilan program pembangunan desa dilihat pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

1.)Perencanaan

UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 80 ayat 1 berbunyi “perencanaan Pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa” menjadi indikator dalam menilai efektifitas pada tahapan perencanaan.

Efektif atau tidaknya perencanaan dinilai dari apakah perencanaan tersebut telah mengadakan musyawarah untuk mengikutsertakan masyarakat atau tidak. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, perencanaan pembangunan desa telah mengadakan musyawarah yang mengikutsertakan masyarakat. melalui musyawarah ini masyarakat diharapkan berpartisipasi untuk memberikan masukan pada pemerintah. Adapun kutipan informan yakni sebagai berikut:

“...kami mengundang anggota BPD dan perwakilan masyarakat untuk menghadiri musyawarah mengenai rencana pengalokasian anggaran...”

-Kepala desa

“... kita diundang ke kantor desa untuk menghadiri musyawarah...”

-Masyarakat

“...selalu dapat undangan untuk menghadiri musyawarah...”-Masyarakat

Pernyataan kepala desa menunjukkan pelibatan masyarakat adalah langkah wajib untuk dilakukan dalam pengelolaan dana. Pengakuan masyarakat membuktikan bahwa akses terhadap informasi dan ruang diskusi sangat terbuka. Adanya musyawarah ini diharapkan menjadi wadah bagi masyarakat mengeluarkan pendapatnya. Namun hasil wawancara terhadap masyarakat tidak

²¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1998).

sesuai harapan. Masyarakat tidak menghadiri musyawarah yang diadakan aparat desa. sebagaimana dalam kutipan berikut:

“...saya tidak ada waktu untuk menghadiri rapat...”-Masyarakat

“Saya pribadi tidak pernah ikut musyawarah...”-Masyarakat

Mekanisme musyawarah yang disediakan pemerintah gagal terwujud karena masyarakat tidak mengindahkan undangan musyawarah tersebut. Akibatnya tahapan perencanaan ini belum efektif sepenuhnya. Karena meskipun musyawarah telah dilakukan, partisipasi masyarakat menjadi keandalanya. Dapat disimpulkan tahapan perencanaan cukup efektif.

Penjelasan diatas tidak jauh berbeda dengan hasil temuan Andini Winarti yang berjudul “Efektivitas Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik di Kabupaten Gowa”. Riset tersebut mengemukakan bahwa tahapan perencanaan terlaksana sesuai aturan maksudnya adalah pemerintah mengajak masyarakat agar turut berpartisipasi menyumbangkan gagasan, pemikiran dan tenaga agar setiap tahapan perencanaan tersebut terlaksana secara efektif.²²

2.)Pelaksanaan

Pelaksanaan pembangunan desa yang efektif berlandaskan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa adalah pelaksanaannya tepat sasaran, tepat waktu dan memnfaatkan potensi lokal.

a.)Tepat sasaran

Indikator utama dari tahapan pelaksanaan adalah tepat sasaran. Hasil wawancara menunjukkan program pembangunan telah tepat sasaran karena memiliki segudang manfaat bagi warga desa. hal ini dibuktikan dengan kesaksian informan berikut:

“...setiap pembangunan dapat benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat...”-Kepala desa

“...menurut saya sangat bermanfaat...”-Masyarakat

“...irigasi berfungsi dengan baik...”-Masyarakat

²² Andini Winarti, “Efektivitas Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Di Kabupaten Gowa” (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020).

Program pembangunan dinilai telah tepat sasaran karena berhasil mentransformasikan perencanaan menjadi manfaat nyata yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. pernyataan kepala desa mengonfirmasi pembangunan bukan sekedar formalitas melainkan jawaban atas kebutuhan masyarakat di lapangan. Kesaksian masyarakat menunjukkan adanya kepuasan yang dirasakan secara langsung berdampak positif. Bukti fisik berupa irigasi yang berfungsi dengan semestinya menandakan kualitas pelaksanaan pembangunan yang mumpuni.

b.) Tepat Waktu

Tolak ukur kedua pada tahap pelaksanaan pembangunan yakni apakah pelaksanaan pembangunan tersebut tepat waktu atau tidak. Dari hasil wawancara Bersama narasumber, program telah tepat waktu seperti terlihat pada kutipan berikut:

“...semua pembangunan pastinya selesai tepat waktu bahkan lebih cepat dari estimasi...”-Kasi Pembangunan

“Setiap proyek selalu terealisasi tepat waktu. Kadang juga selesai sebelum tenggat waktunya.-Masyarakat

Tahapan pelaksanaan pembangunan telah mencapai efisiensi waktu yang optimal, dimana penyelesaian pekerjaan tidak sekedar memenuhi tenggat tetapi melampaui estimasi secara konsisten. Validasi dari masyarakat mengonfirmasi bahwa kenyataan dilapangan sejalan dengan klaim administrasi yang dinyatakan oleh pemerintah. Hal ini menciptakan kepercayaan terhadap pelayanan publik.

c.) Pemanfaatan Potensi Lokal

Potensi lokal menjadi indikator penutup di tahapan ini. Pembangunan sudah semestinya memberdayakan masyarakat sekitar, bukannya melibatkan pihak ketiga. Menurut kesaksian para informan pemerintah desa telah memberdayakan warga lokal dalam pelaksanaan pembangunan, berikut kutipannya:

“...masyarakat selalu dilibatkan...”-Sekretaris desa

“... saya pernah terlibat dalam pembangunan...”-Masyarakat

“...saya dan rekan-rekan saya ikut langsung pada proyek...”

Kutipan diatas memvalidasi bahwa benar pelaksanaan pembangunan desa telah memanfaatkan potensi lokal dalam perealisasiannya. Pembangunan desa bersifat mandiri dengan menjadikan masyarakat sebagai pemeran utama dalam pembangunan sehingga potensi sumber daya manusia di desa terberdayakan secara optimal. Pengakuan langsung dari masyarakat menjadi bukti bahwa keterlibatan warga lokal bukanlah klaim dari pihak pemerintah saja melainkan pengalaman nyata yang dirasakan warga.

Tahapan pelaksanaan pembangunan desa di Desa Awo Gading sudah berjalan dengan efektif karena sudah sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 81 ayat 2 yakni “Pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong.” Serta pasal 81 ayat 3 yang berbunyi “Pelaksanaan Pembangunan desa dilakukan dengan memanfaatkan kearifan local dan sumber daya alam desa.”²³

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Majjon dengan judul “Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar” yakni dalam tahapan pelaksanaan pembanguan didasarkan pada hasil musyawarah yang diputuskan melalui musrenbang desa serta proyek pembangunan dilakukan secara mandiri artinya yang mengambil bagian pada pelaksanaan program adalah masyarakat itu sendiri.²⁴

3.)Pengawasan dan Evaluasi

Tahapan akhir dari pembangunan adalah pengawasan dan evaluasi. Dalam tahapan ini masyarakat kembali mengambil peran dengan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan dan memberikan saran jika terdapat kekurangan yang terjadi pada program pembangunan tersebut. Proses pengawasan dan evaluasi pembangunan di Desa Awo Gading dapat dikatakan telah efektif karena telah memenuhi kedua indikator pengawasan yakni:

a.) Akuntabilitas Penyelenggara

²³ Pemerintah Pusat, “Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,” Pub. L. No. 6 (2014), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>.

²⁴ Majjon Kinaro, “Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019).

Indikator ini merupakan tolak ukur pertama dalam menentukan efektifitas pada tahapan pengawasan pembangunan. Berdasarkan hasil wawancara indikator ini telah terpenuhi dengan dibuktikan oleh kutipan berikut:

“...setiap proyek pembangunan terdapat atau papan informasi yang berisi besaran anggaran...” -Kepala desa

“...tidak ada yang ditutup-tutupi karena dalam baliho tersebut dipaparkan secara rinci...”- Sekretaris desa

“...setiap ada proyek itu ada baliho yang dipasang isinya besaran dana yang dikeluarkan untuk proyek itu”.-Masyarakat desa

Dengan melakukan triangulasi sumber dari ketiga kutipan informan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa indikator akuntabilitas penyelenggara pada tahapan pengawasan dinilai efektif.

b.)Evaluasi kegiatan

Tolak ukur kedua pengawasan adalah evaluasi kegiatan. Evaluasi kegiatan sendiri telah dilakukan oleh pemerintah desa dengan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapatnya. Seperti yang terlihat pada kutipan berikut:

“...masyarakat menyampaikan secara langsung jika terdapat hal yang perlu dievaluasi...”

“...bisa disampaikan langsung keluh kesahnya...”

Kutipan diatas menjadi bukti bahwa evaluasi kegiatan sudah dilakukan juga. Dengan kata lain kedua indikator dari tahapan pengawasan ini telah terpenuhi sehingga dikategorikan pengawasan sudah berjalan dengan efektif.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Maijon dengan judul “Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar” juga tidak jauh berbeda. Pada tahapan pengawasan pembangunan telah terlaksana dengan baik tapi untuk dikatakan efektif itu belum karena tidak selaras dengan UU No. 6 Tahun 2014. Setiap program yang terlaksana telah dibuatkan laporan pertanggungjawaban dan menginformasikannya kepada masyarakat namun tidak terdapat rapat pemaparan

laporan pertanggungjawaban yang mengundang masyarakat, melainkan hanya mengundang tokoh masyarakat saja.²⁵

b. Faktor-faktor yang Memengaruhi Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur di Desa Awo’Gading

Pengelolaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur kerap kali menemui berbagai faktor yang menghambat jalannya program. Faktor penghambat ini diartikan sebagai suatu kendala yang memungkinkan proses pembangunan mengalami keterlambatan. Dalam suatu proyek tidak akan pernah lepas dari kendala untuk mencapai tujuan.

Perencanaan merupakan tahapan awal dalam pembangunan, hal ini menunjukkan bahwa perencanaanlah yang menjadi dasar dalam keberhasilan suatu program yang akan dijalankan. Dalam hal perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa Awo’Gading telah terlaksana sebagaimana mestinya, yakni bersifat transparan terhadap masyarakat terkait dengan rencana pembangunan yang diwujudkan dengan diadakannya musyawarah desa untuk membahas perencanaan pembangunan. Namun, di sisi lain masyarakat kurang aktif dalam berpartisipasi saat musyawarah sehingga perencanaan pembangunan menjadi kurang efektif. Hal ini menyebabkan pihak pemerintah desa selaku pelaksana pembangunan belum bisa memahami apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan seluruh masyarakatnya karena kurangnya kehadiran masyarakat dalam musyawarah, sehingga usulan yang tersampaikan hanya dari sebagian warga saja. Dapat disimpulkan bahwa pendapat dari sebagian kecil warga belum bisa mewakili seluruh suara masyarakat desa.

Kesimpulan yang dapat ditarik oleh peneliti mengenai penjabaran di atas yakni dalam pengelolaan dana desa terkait pembangunan bukanlah berasal dari pihak pemerintah desa, melainkan dari masyarakat itu sendiri yang kurang aktif partisipasinya pada setiap musyawarah yang diadakan oleh pemerintah desa.

²⁵ Kinaro.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengelolaan dana desa di Desa Awo'Gading masih berada dalam proses menuju efektivitas yang ideal. Hal ini dikarenakan indikator yang menjadi tolak ukur dalam menilai efektifitas belum sepenuhnya terpenuhi. Pada tahapan perencanaan belum efektif karena indikatornya adalah partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa belum terpenuhi. Tahap pelaksanaan sudah efektif karena sudah memenuhi seluruh indikator yakni tepat sasaran dan tepat waktu, pemanfaatan potensi lokal sedangkan pada tahapan pengawasan juga sudah efektif karena indikatornya telah terpenuhi yakni akuntabilitas penyelenggara dan evaluasi kegiatan yang dibuktikan oleh keterangan dari masyarakat yang menjadi narasumber penelitian. Keberhasilan pada aspek pelaksanaan dan pengawasan menggambarkan kapasitas aparat desa dalam menjalankan pembangunan sudah mumpuni. Namun kualitas perencanaan perlu ditingkatkan dengan mendorong keterlibatan masyarakat agar lebih aktif. Minimnya partisipasi dari masyarakat menjadikan pembangunan belum sepenuhnya berlandaskan dari kebutuhan seluruh warga desa.

B. Saran

1. Bagi pemerintah desa sekiranya selalu mengikutsertakan warga pada setiap kegiatan pembangunan desa, bukan hanya dalam tahapan perencanaan dan pelaksanaan melainkan juga pada tahapan pengawasan agar setiap program dapat terlaksana secara efektif dan efisien.
2. Bagi masyarakat desa Awo Gading diharapkan selalu mengambil peran pada setiap program yang diadakan oleh pemerintah baik itu dalam

program pembangunan fisik maupun nonfisik agar tercapainya pembangunan yang efektif demi tercapainya tujuan utama yaitu kesejahteraan bersama.

3. Bagi peneliti selanjutnya kiranya mengangkat lebih banyak sampel penelitian seperti mengambil data dari beberapa desa alih-alih hanya satu desa yang menjadi subjek penelitian agar hasil penelitiannya lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, Albi, and Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Anwar, Adji Priatna, and Fitri Melawati. “Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Di Desa Cinengah Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat” 1 (2024). <https://doi.org/10.30737/interaksi.v1i1.5174>.
- Arafat, Ahmad Yasir. “Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Pada Gampong Dham Pulo Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar.” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023.
- Arianto, Bambang. *Triangulasi Metoda Penelitian Kualitatif*. Balikpapan: Borneo Novelty Publishing, 2024.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Armaini, Rosy. “Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Pencapaian Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa Di Desa Karang Agung Kabupaten Pati.” *Jurnal ACSY: Jurnal Accounting Politeknik Sekayu* 6 (2017): 57.
- Arno, Abd Kadir. “Penyusunan Anggaran Perspektif Fiqhi Anggaran Hukum Ekonomi Syariah.” *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 1, no. 1 (2019): 32. <https://doi.org/10.24256/alw.v1i1.625>.
- Batjo, Nurdin, and Mahadin Shaleh. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Makassar: Aksara Timur, 2018.

- Dorce Seri. “Faktor-Faktor Perencanaan Pembangunan.” Awo’Gading: Wawancara, 2025.
- G, Ibrahim. “Tahapan Pelaksanaan Pembangunan.” Awo’Gading: Wawancara, 2025.
- Hasibuan, Zainal Efendi. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kualitatif, Kuantitatif, Kepustakaan, Dan PTK*. Malang: AE Publishing, 2024.
- Hasnawati. “Tahapan Pelaksanaan Pembangunan.” Awo’Gading: Wawancara, 2025.
- . “Tahapan Pengawasan Pembangunan.” Awo’Gading: Wawancara, 2025.
- . “Tahapan Perencanaan Pembangunan.” Awo’Gading: Wawancara, 2025.
- Heri. “Tahapan Pelaksanaan Pembangunan.” Awo’Gading: Wawancara, 2025.
- . “Tahapan Perencanaan Pembangunan.” Awo’Gading: Wawancara, 2025.
- Ibrahim G. “Tahapan Perencanaan Pembangunan.” Awo’Gading: Wawancara, 2025.
- Ikayanti, Tri. “Tahapan Pengawasan Pembangunan.” Awo’Gading: Wawancara, 2025.
- Irmansyah, Sri Wahyuni Mustafa, and Rahmat Solling Hamid. “Efektivitas Kebijakan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur.” *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2021): 1086–95. <https://doi.org/10.36778/jesya.v4i2.479>.
- Israng. “Tahapan Pelaksanaan Pembangunan.” Awo’Gading: Wawancara, 2025.
- . “Tahapan Pengawasan Pembangunan.” Awo’Gading: Wawancara, 2025.
- . “Tahapan Perencanaan Pembangunan.” Awo’Gading: Wawancara, 2025.
- Juliani, and Syahbudin. *Prinsip Dan Aplikasi Metode Penelitian Kualitatif(Kajian Teori Dan Praktik)*. Medan: CV. Merdeka Kreasi, 2025.
- Karuh, Meyfy Mercy, and Tuti Widyaningrum. “Penyelewengan Dana Desa: Tinjauan Terhadap Korupsi Dan Upaya Penanggulangannya Di Desa Songbledeg, Kabupaten Wonogiri.” *Iblam Law Review* 4 (2024).
- Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1998.
- Kemenkeu RI. *Buku Saku Dana Desa*. Jakarta: DJPK, 2017.

- Kinaro, Maijon. “Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar.” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.
- Kurniawan, Agung. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan, 2005.
- Lubis, Henny Zurika. *Siskeudes: Inovasi Digital Dalam Pengelolaan Dana Desa*. Medan: Umsu Press, 2025.
- Luthfiyani, Putri Wahidah, and Sri Murhayati. “Strategi Memastikan Keabsahan Data Dalam Penelitian Kualitatif.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 3 (2024): 45315–28.
<https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/21803/15330>.
- Maryunani. *Ekonomi Pedesaan*. Malang: UB Press, 2020.
- Munir, and H Dasril. *Kebijakan Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: YPAP, 2004.
- Nasruddin, Taufik, and Amrie Firmansyah. “Menutup Celah Korupsi: Evaluasi Pengawasan APIP Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Indonesia” 3 (2024).
- Nova Sulastri. “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa(ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna.” Universitas Halu Oleo Kendari, 2016.
- Pendidikan, Departemen. *Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI)*. Jakarta: Gramedia, 2007.
- Pojualwanto, Basuki. *Perekonomian Indonesia: Tinjauan Historis, Teoritis, Dan Empiris*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Prayitno, Gunawan, and Aris Subagiyo. *Pembangunan Desa: Merencanakan Desa Dengan Pendekatan Partisipatif Dan Berkelanjutan*. Malang: UB Press, 2018.
- Pusat, Pemerintah. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pub. L. No. 6 (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>.
- Raharjo, Muhammad Mu’iz. *Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta: Bumi Aksara, 2021.

- Raharjo, Muhammad Muiz. *Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta: Bumi Aksara, 2020.
- Rangga, Icuk, and Erwin Setyadi. *Optimalisasi Potensi Desa Di Indonesia*. Jakarta: PT. Grasindo, 2019.
- Risal. “Tahapan Pelaksanaan Pembangunan.” Awo’Gading: Wawancara, 2025.
- . “Tahapan Perencanaan Pembangunan.” Awo’Gading: Wawancara, 2025.
- Safri, Hendra. *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Palopo: Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo, 2018.
- Sakdiyah, Halimatus, Ika Lis Mariatun, and Zaiful Arief. “Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Bilaporah Tahun 2021.” *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha* 14, no. 1 (2022): 190–93. <https://doi.org/10.0A23887/jjpe.v14i1.0A48427>.
- Sembel, Tesyalom, Rony Gosal, and Sofia Pangemanan. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi Di Desa Sinsingon Barat Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow).” *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* Volume 1 (2017).
- Seri, Dorce. “Tahapan Pelaksanaan Pembangunan.” Awo’Gading: Wawancara, 2025.
- Setyadi, Erwin. *Panduan Penggunaan Dan Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta: PT. Grasido, 2010.
- Shaleh, Mahadin. *Kepemimpinan Dan Organisasi*. Palopo: Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo, 2018.
- . *Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai*. Makassar: Aksara Timur, 2018.
- Siagian, Sondang. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: PT. Gunung Agung, 1985.
- Solehan, and Sukresno. “Implementasi Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan Pemerintahan Desa Yang Baik (Studi Kasus Di Desa Ngabul Kabupaten Jepara).” *Ekonomi, Koperasi Dan Kewirausahaan* 15 (2024).
- Sudianto, Dedi. “Tahapan Pelaksanaan Pembangunan.” Awo’Gading: Wawancara, 2025.
- . “Tahapan Pelaksanaan Pembangunan.” Awo’Gading: Wawancara, 2025.
- Sudianto, Dedy. “Tahapan Perencanaan Pembangunan.” Awo’Gading:

Wawancara, 2025.

- Sugiarti. “Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Palakka Kabupaten Barru.” IAIN Pare-Pare, 2024.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- . *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sulastri, N. “Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakopodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna.” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Halu Oleo Kendari*, 2016, 16.
- Sulastri, Nova. “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Wakopute Kabupaten Muna.” Universitas Halu Oleo Kendari, 2016.
- Syafrie. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES, 1974.
- Twendo, Marza. *Kumpulan Perundang-Undangan Di Indonesia*. Jakarta: Visimedia, 2017.
- Warsito, Herman. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bina Aksara, 2007.
- Winarti, Andini. “Efektivitas Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Di Kabupaten Gowa.” Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020.
- Zuriah, Nurul. *Metode Penelitian Sosial Dan Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.

Lampiran 1

INSTRUMEN WAWANCARA
Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan
Infrastruktur di Desa Awo’Gading

Kategori Informan: Aparat Desa

Indikator I: Perencanaan

Topik: Musyawarah Desa & Transparansi Rencana

1. "Bagaimana tahapan dan mekanisme musyawarah desa dilakukan dalam merencanakan pembangunan infrastruktur, dan sejauh mana hasil musyawarah tersebut benar-benar dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan?"
2. "Bagaimana Anda memastikan transparansi dalam penyampaian rencana penggunaan dana desa?"
3. Faktor-faktor apa saja yang dapat menghambat jalannya proses perencanaan pembangunan?

Indikator II: Pelaksanaan

Topik: Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Potensi Desa

1. Bagaimana Anda menentukan prioritas pembangunan infrastruktur agar tepat sasaran?
2. Apakah pembangunan infrastruktur selalu dapat diselesaikan tepat waktu? Jika tidak, apa kendalanya?
3. Apakah masyarakat dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan, bagaimana prosesnya?

4. Bagaimana desa mengidentifikasi dan mengoptimalkan pemanfaatan potensi lokal (sumber daya alam dan manusia) dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur?
5. Faktor-faktor apa saja yang dapat menghambat pelaksanaan pembangunan?

Indikator III: Pertanggungjawaban / Pengawasan

Topik: Akuntabilitas Penyelenggara & Evaluasi Kegiatan

1. Bagaimana bentuk laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa yang disampaikan kepada masyarakat?
2. Bagaimana proses evaluasi pembangunan infrastruktur dilakukan setelah kegiatan selesai serta siapa saja pihak yang dilibatkan, dan bagaimana hasil evaluasi tersebut digunakan untuk perbaikan program selanjutnya?"
3. Apa yang menjadi tantangan dalam tahapan pertanggungjawaban atau pengawasan dalam pembangunan?

Kategori Informan: Masyarakat

Indikator I – Perencanaan

Topik: Musyawarah Desa & Transparansi Rencana

1. Apakah Anda pernah mendapatkan informasi tentang rencana pembangunan infrastruktur desa, jika pernah bagaimana bentuk informasinya?
2. Apakah Anda pernah dilibatkan dalam musyawarah desa?

Indikator II – Pelaksanaan

Topik: Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Potensi Desa

1. Menurut Anda, apakah pembangunan yang telah dilaksanakan benar-benar bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat desa?
2. Apakah pembangunan selesai tepat waktu sesuai yang dijanjikan?
3. Pernahkah Anda terlibat langsung dalam kegiatan pembangunan desa?
4. Menurut Anda, apakah desa sudah memanfaatkan tenaga dan sumber daya lokal dengan baik?

Indikator III – Pertanggungjawaban / Pengawasan

Topik: Akuntabilitas Penyelenggara & Evaluasi Kegiatan

1. Apakah Anda pernah menerima informasi terkait laporan penggunaan dana desa dan apakah informasi tersebut mudah dipahami?
2. Jika Anda menemukan kekurangan dalam pembangunan desa, apakah tersedia wadah atau kesempatan yang terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik atau masukan?

Lampiran 2

SURAT IZIN PENELITIAN



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jln. Jend. Sudirman, Kelurahan Senga, Kecamatan Belopa, Kab. Luwu Telpn : (0471) 3314115

Nomor : 0406/PENELITIAN/21.06/DPMPSTP/VIII/2025 Kepada
 Lamp : - Yth. Ka. Desa Awo Gading
 Sifat : Biasa di -
 Perihal : **Izin Penelitian** Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Palopo : B 193 /Un.38/FEBI/HM.0108/2025 tanggal 26 Agustus 2025 tentang permohonan Izin Penelitian.
 Dengan ini disampaikan kepada saudara (i) bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama	: Fauzia Afdilla
Tempat/Tgl Lahir	: To pongo / 05 Januari 2005
Nim	: 2204030066
Jurusan	: Manajemen Bisnis Islam
Alamat	: To pongo Desa Awo Gading Kecamatan Lamasi

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/instansi Saudara (i) dalam rangka penyusunan "Skripsi" dengan judul :

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN
 INFRASTRUKTUR DI DESA AWO GADING**

Yang akan dilaksanakan di **DESA AWO GADING**, pada tanggal **28 Agustus 2025 s/d 28 September 2025**

Sehubungan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sbb :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan harus melaporkan kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
5. Surat izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.



Diterbitkan di Kabupaten Luwu
 Pada tanggal : 28 Agustus 2025
 Kepala Dinas



Drs. MUHAMMAD RUDI, M.Si
 Pangkat : Pembina Utama Muda IV/c
 NIP : 19740411 199302 1 002

Tembusan :

1. Bupati Luwu (sebagai Laporan) di Belopa;
2. Kepala Kesbangpol dan Linmas Kab. Luwu di Belopa;
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Palopo;
4. Mahasiswa (i) Fauzia Afdilla ;
5. Arsip.



Wawancara Kepala Desa Awo'Gading, Bapak Dedi Sudianto



Wawancara Sekretaris Desa Awo'Gading, Bapak Ibrahim G



Wawancara Bendahara Desa Awo'Gading, Ibu Tri Ikyanti



Wawancara Kaur Pembangunan Desa Awo'Gading, Ibu Dorce Seri



Wawancara Masyarakat Desa, Ibu Hasnawati



Wawancara Masyarakat Desa, Bapak Israng

Tunitin

Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur di Desa Awo'Gading

ORIGINALITY REPORT

17%	16%	10%	8%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	2%
2	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
3	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%
4	www.repository.umuslim.ac.id Internet Source	1%
5	Submitted to Universitas Negeri Manado Student Paper	1%
6	ejournal.undiksha.ac.id Internet Source	1%
7	www.slideshare.net Internet Source	<1%
8	Submitted to Universitas Muhammadiyah Surakarta Student Paper	<1%
9	docplayer.info Internet Source	<1%
10	Submitted to Iain Palopo Student Paper	<1%
11	Submitted to Universitas Islam Malang Student Paper	

RIWAYAT HIDUP



FAUZIA AFDILLA, lahir di kota Banjar pada tanggal 5 Januari 2005. Peneliti merupakan anak pertama dari empat bersaudara, dari pasangan Ibrahim G, S.Kom. dan Parsini. Saat ini peneliti berdomisili di Desa Awo’Gading, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu. Peneliti menyelesaikan Pendidikan dasar pada tahun 2016 dan ditahun yang sama melanjutkan Pendidikan pada SMPN 1 Lamasi dan menyelesaikannya pada tahun 2019 lalu melanjutkan Pendidikan ke jenjang SMA pada tahun yang sama di SMAN 11 LUWU. Saat menempuh Pendidikan di SMA peneliti bergabung dengan ekstrakurikuler Paskibra dan Pramuka hingga menyelesaikan Pendidikan pada tahun 2022. Di tahun yang sama peneliti melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Palopo dengan konsentrasi Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saat menempuh perguruan tinggi, peneliti aktif bergabung di salah satu organisasi ekstra kampus yakni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia(KAMMI) dan tergabung dalam Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Palopo serta aktif mengikuti program magang MBKM pada PT. Bumi Mineral Sulawesi dan Dinas PUPR Kota Palopo.

Contact Person Penulis: 2204030066@uinpalopo.ac.id